

**ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH**

Studi Kasus pada Pemerintah Kota Bengkulu

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi



oleh

Theresia Syntia Riani

022114092

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2008

**ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH**

Studi Kasus pada Pemerintah Kota Bengkulu

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi



oleh

Theresia Syntia Riani

022114092

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

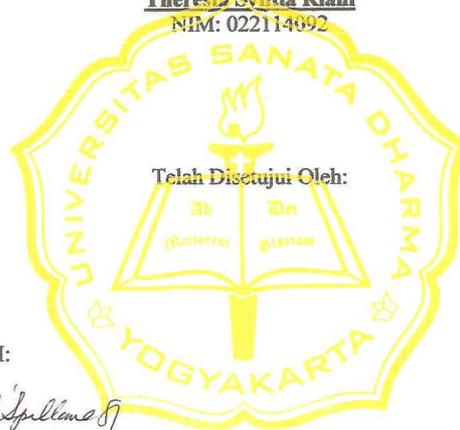
YOGYAKARTA

2008

SKRIPSI

**ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH**
Studi Kasus pada Pemerintah Kota Bengkulu

Oleh:
Theresia Syntia Riani
NIM: 022114692



Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I:

James J. Spillane

Dr. James J. Spillane, S.J.

Tanggal 14 Maret 2008

Pembimbing II:

Firma Sulistiyowati

Firma Sulistiyowati, SE., M. Si

Tanggal 1 April 2008

Skripsi

**ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH**

Studi Kasus pada Pemerintah Kota Bengkulu

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Theresia Syntia Riani

NIM: 022114092

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

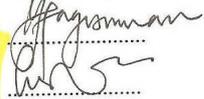
Pada Tanggal 28 April 2008

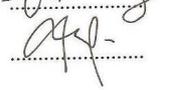
dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

	Nama Lengkap
Ketua	Dra. YFM. Gien Agustinawansari, M.M., Akt
Sekretaris	Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt.
Anggota	Dr. J.J. Spillane, S.J.
Anggota	Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si.
Anggota	A. Diksa Kuntara, S.E., M.F.A.

Tanda Tangan


.....

.....

.....

Yogyakarta, 30 April 2008
Fakultas Ekonomi
Universitas Sanata Dharma
Dekan,




Drs. Alex Kahu Lantum, M.S.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*Karena kamu ingin suatu bukti, bahwa Kristus berkata-kata dengan perantaraan aku, dan Ia tidak lemah terhadap kamu, melainkan berkuasa ditengah-tengah kamu
(II Korintus, 13:3)*

*Aku terbang di angkasa tanpa batas, berputar di dalam khayal,
mendekati daerah cahaya tertinggi
(Kahlil Gibran)*

*Harapan selalu muncul setiap kali kita terjaga dari Mimpi
(Aristoteles)*

Skripsi ini Kupersembahkan Kepada...
✝ *Tuhan Yesus Kristus Juruslamatku,
Bapa dan Sahabatku*
♥ *Yang Tercinta Bapak dan Mama*
♥ *Oyen dan Pras, tersayang*
♥ *Andre Terkasih*



UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul: Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kota Bengkulu) dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 28 April 2008 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 1 April 2008
Yang membuat pernyataan,


(Theresia Syntia Riani)

ABSTRAK

ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH

Studi Kasus pada Pemerintah Kota Bengkulu

Theresia Syntia Riani
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta 2008

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Transfer Pemerintah dilihat dari laju pertumbuhan PAD dan Transfer Pemerintah; dan untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dilihat dari DOFD yakni rasio PAD terhadap TPD dan rasio antara PAD terhadap TP, Peranan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Peranan Sumbangan dan Bantuan, Indeks Kemampuan Rutin Daerah.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus pada Pemerintah Kota Bengkulu. teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan perbandingan antara realisasi penerimaan pada tahun tertentu dengan tahun sebelumnya, perbandingan antara PAD dengan TPD dan perbandingan PAD dengan Transfer Pemerintah, perbandingan BHP terhadap TPD, perbandingan SB terhadap TPD, perbandingan TPAD terhadap TPRD.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besar tingkat pertumbuhan PAD dan TP dilihat dari rata-rata pertumbuhan PAD di Kota Bengkulu dari tahun 2000 – 2005 meningkat, rata-rata pertumbuhan Transfer Pemerintah meningkat; besar kemampuan keuangan daerah yakni DOFD dari rasio antara PAD terhadap TPD cenderung menurun, dan dari rasio PAD terhadap Transfer Pemerintah cenderung meningkat, PBHP cenderung berfluktuasi, PSB cenderung meningkat, IKRD cenderung berfluktuasi.

ABSTRACT

AN ANALYSIS OF REGIONAL FINANCIAL POTENTIAL IN THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL AUTONOMY

A Case Study at The Municipality Government of Bengkulu

Theresia Syntia Riani
Sanata Dharma University
Yogyakarta 2008

The research aimed to know the growth level of Pendapatan Asli Daerah (PAD) and government transfer as viewed from the growth of PAD and government transfer; and to know the level of financial regional capability in the implementation of regional autonomy as viewed from DOFD (Derajat Otonomi Fiskal Daerah) that were the between PAD and TPD, and the ratio of PAD and government transfer, PBHP (Peranan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak), PSB (Peranan Sumbangan dan Bantuan), IKRD (Indeks Kemampuan Rutin Daerah).

This research was a case study at the municipality government of Bengkulu. In order to collect the data, the writer used library survey, interview, and the documentation. In the analysis the writer used the comparison between PAD realization of certain year and the one in the previous year, the comparison between PAD and TPD, between PAD and government transfer, between BHP (Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak) and TPD, between SB (Sumbangan dan Bantuan) and TPD, the comparison between TPAD (Total Pendapatan Asli Daerah) and TPRD (Total Pengeluaran Rutin Daerah) to analyze the data.

The result of this research showed that the average of PAD growth was increasing, the average the government transfer was increasing; DOFD (Derajat Otonomi Fiskal Daerah) as seen from ratio between PAD and TPD was decreasing, and fro the ratio of PAD and government transfer was increasing, PBHP (Peranan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak) was fluctuating, PSB (Peranan Sumbangan dan Bantuan) was increasing, IKRD (Indeks Kemampuan Rutin Daerah) was fluctuating.

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Universitas Sanata Dharma :

Nama : Theresia Syntia Riani

Nomor Mahasiswa : 022114092

Demi pengembangan ilmu penguasaan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah saya yang berjudul :

**Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah:
Studi Kasus pada Pemerintah Kota Bengkulu.**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal : 30 April 2008

Yang menyatakan



(Theresia Syntia Riani)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus atas segala hikmat, berkat, rahmat, karunia, bimbingan dan kasih-Nya sehingga tugas penyusunan skripsi dapat terselesaikan.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai derajat Sarjana Ekonomi (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta berupa penelitian mengenai “ Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah”.

Dalam pelaksanaan penelitian skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Romo Rektor Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kepribadian dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Drs. Alex Kahu Lantum, M.S., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
3. Ir. Drs. Hansiadi Y.H., M.Si., Akt, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
4. Dr. James J. Spillane, S.J., sebagai Pembimbing I yang telah dengan sabar memberikan masukan, bimbingan dan pengarahan selama penelitian hingga penulisan skripsi ini.

5. Firma Sulistiyowati, SE., M. Si, sebagai Pembimbing II yang telah dengan sabar memberikan masukan, bimbingan dan pengarahan selama penelitian hingga penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta yang turut membantu proses belajar penulis selama kuliah.
7. Bapak dan Mamaku tercinta serta adekku tersayang yang selalu memberikan dukungan doa dan motivasi serta setia mendengarkan keluhku dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Saudara – saudaraku di Bkl, Plg, Llg, makasih atas semangatnya buat aku.
9. Teman-temanku: Lisa, Tantri, Elis, Mace Helen, Nanie, Indah, Aris, Mas Dedy dan anak-anak Beo 49 terima kasih buat kebersamaan yang masih dirasakan sampai sekarang.
10. Seseorang “ Andre” yang sudah membuat aku belajar untuk memahami dan mengerti serta memberikan kenangan tersendiri di hati.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebut namanya satu persatu di sini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukannya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati.

Tuhan Yesus memberkati

Yogyakarta, 1 April 2008

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Batasan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	6
BAB II. LANDASAN TEORI	9
A. Otonomi Daerah	9
B. Perkembangan Pemikiran Otonomi Daerah.....	12
C. Kemampuan Keuangan Daerah.....	13

D. Manajemen Keuangan Daerah	17
E. Pendapatan Asli Daerah	25
F. Transfer Pemerintah	26
G. Derajat Otonomi Fiskal Daerah	28
BAB III. METODE PENELITIAN.....	30
A. Jenis Penelitian.....	30
B. Tempat dan Waktu Penelitian	31
C. Jadwal Penelitian.....	31
D. Subjek dan Objek Penelitian	32
E. Data yang diperlukan	32
F. Teknik Pengumpulan Data.....	33
G. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV. GAMBARAN UMUM KOTA BENGKULU	40
A. Sejarah Singkat Berdirinya Kota Bengkulu	40
B. Kondisi Geografis	42
C. Iklim	43
D. Pemerintah Daerah	43
E. Pembagian Wilayah	44
F. Kependudukan.....	44
G. Tenaga Kerja	46
H. Transportasi.....	47
I. Pos dan Komunikasi.....	47
J. Kekayaan Alam.....	48

K. Nilai-nilai Budaya	49
L. Ekonomi	51
BAB V. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	53
A. Diskripsi Data	53
B. Analisis Data	58
C. Pembahasan.....	69
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah	16
Tabel III. 1 Kategori Kemampuan Rutin Daerah.....	37
Tabel III. 2 Kategori Kemampuan Keuangan Daerah	38
Tabel IV. 1 Jarak antara Balai Kota Bengkulu dengan Kantor Kecamatan	43
Tabel IV. 2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	
Per Kecamatan Tahun 2006	44
Tabel IV. 3 Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	
Di Kota Bengkulu Tahun 2006	45
Tabel V. 1 Realisasi Penerimaan PAD di Kota Bengkulu	
Tahun Anggaran 1996/1997 – Tahun 2005	52
Tabel V. 2 Realisasi Transfer Pemerintah Kota Bengkulu	
Tahun Anggaran 1996/1997 – Tahun 2005	53
Tabel V. 3 Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Bengkulu	
Tahun Anggaran 1996/1997 – Tahun 2005	54
Tabel V. 4 Total Penerimaan Daerah Kota Bengkulu	
Tahun Anggaran 1996/1997 – Tahun 2005	55
Tabel V. 5 Realisasi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Kota Bengkulu	
Tahun Anggaran 1996/1997 – Tahun 2005	56
Tabel V. 6 Realisasi Sumbangan dan Bantuan Kota Bengkulu	
Tahun Anggaran 1996/1997 – Tahun 2005	56

Tabel V. 7 Total Pengeluaran Rutin Daerah Kota Bengkulu	
Tahun Anggaran 1996/1997 – Tahun 2005	57
Tabel V. 8 Perkembangan dan Pertumbuhan PAD Kota Bengkulu	
Tahun Anggaran 1996/1997 – Tahun 2005	59
Tabel V. 9 Perkembangan dan Pertumbuhan TP Kota Bengkulu	
Tahun Anggaran 1996/1997 – Tahun 2005	63
Tabel V. 10 Rasio PAD Terhadap TPD Kota Bengkulu	
Tahun Anggaran 1996/1997 – Tahun 2005	64
Tabel V. 11 Rasio PAD Terhadap TP Kota Bengkulu	
Tahun Anggaran 1996/1997 – Tahun 2005	65
Tabel V. 12 Peranan PAD terhadap TPD Kota Bengkulu	
Tahun Anggaran 1996/1997 – Tahun 2005	67
Tabel V. 13 Perkembangan dan Pertumbuhan BHP Kota Bengkulu	
Tahun Anggaran 1996/ 1997 – Tahun 2005	68
Tabel V. 14 Peranan BHP Terhadap TPD Kota Bengkulu	
Tahun Anggaran 1996/1997 – Tahun 2005	69
Tabel V. 15 Peranan SB Terhadap TPD Kota Bengkulu	
Tahun Anggaran 1996/1997 – Tahun 2005	70
Tabel V. 16 Peranan PAD Terhadap PRD Kota Bengkulu	
Tahun Anggaran 1996/1997 – Tahun 2005	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemasalahan dalam pemerintahan semakin lama semakin kompleks. Permasalahan tersebut mengakibatkan suatu sistem pemerintahan yang sentralisasi sulit untuk diterapkan. Pemerintahan dalam hal ini, menyebabkan adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah sentral yaitu adanya sistem desentralisasi pada masing- masing daerah, yang lebih dikenal dengan istilah otonomi daerah.

Pada dasarnya otonomi atau desentralisasi merupakan upaya mencari titik optimal dalam penyerahan urusan dan tanggung jawab antar berbagai tingkat pemerintah guna menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam arti pemerintah yang bersih (jujur), terbuka (transparan), dan bertanggung jawab terhadap masyarakat (Bastian, 2001: 229).

Berbagai masalah yang mengiringi proses pemekaran selama ini seolah memperkuat dugaan tidak adanya desain besar yang menjadi pijakan untuk menentukan sejauh mana perluasan badan pemerintah subnasional di Indonesia. Tidak jelasnya arah pemekaran menjadi stimulus aktif yang mendorong daerah-daerah untuk lepas dari induknya dan berdiri sendiri menjadi daerah yang otonom. Upaya pembentukan daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik yang tujuan utamanya meningkatkan kesejahteraan rakyat, perluasan ruang bagi

pendidikan politik, pemberdayaan masyarakat, serta mengoptimalkan sumber daya alam agar bisa lebih dinikmati masyarakat di daerah tersebut. Namun dalam praktiknya, tak jarang pemekaran lebih dimotivasi oleh obsesi daerah mengejar kucuran dana dari pusat yang pada akhirnya merangsang adanya korupsi. Melencengnya praktik pemekaran dari tujuan utamanya, pada akhirnya hanya membebani anggaran negara dan mempertebal jarak masyarakat dari kesejahteraan.

Proyek pemekaran daerah menghabiskan anggaran negara yang tidak sedikit. Tanggapan yang berlangsung selama era otonomi daerah satu dekade terakhir lebih banyak mengilustrasikan gegar politik pasca reformasi. Selama masa orde baru, rezim pemerintahan sentralistik mengerdilkan peran daerah dan mengeruk sumber daya di daerah dengan orientasi yang tidak pro pemerataan. Oleh karenanya, momentum otonomi dimanfaatkan oleh daerah untuk menuntut hak-hak yang sebelumnya diabaikan pemerintah pusat. Pengawasan pemerintah dinilai terlalu lemah atas pemekaran wilayah yang berlangsung selama ini.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Wewenang Pusat dan Propinsi. Dengan diberlakukannya otonomi daerah sejak tahun 2000, maka daerah harus berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan daerahnya pada Kota Bengkulu.

Peraturan Pemerintah No.129 Tahun 2000 merupakan turunan dari UU No.22 Tahun 1999. Peraturan Pemerintah yang mengatur persyaratan pembentukan dan

kriteria pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah dinilai terlalu longgar. Dalam PP No.129 Tahun 2000, kriteria yang diatur diantaranya adalah kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, dan luas daerah. Melalui rancangan peraturan pemerintah yang sedang dalam proses pembahasan itu, kriteria diperluas dengan tambahan soal pertahanan, keamanan, kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali. Syarat fisik kewilayahan diperberat melalui RPP ini. Pembentukan daerah otonom baru yang sebelumnya cukup dengan minimal tiga kabupaten/kota untuk tingkat propinsi, menjadi minimal lima kabupaten/kota. Pemerintah, dalam hal ini Departemen Dalam Negeri, juga tak kunjung tuntas menyusun rencana induk penataan daerah untuk mengatur patokan jumlah propinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.

Otonomi daerah di Kota Bengkulu direncanakan sejak tahun 1999 dan pelaksanaannya tahun 2000. Salah satu tujuannya adalah untuk memaksimalkan potensi ataupun kekayaan masing-masing daerah, sehingga mampu mengembangkan setiap potensi yang ada. Banyak masyarakat Indonesia yang berdomisili di luar pulau Jawa, merasa hasil bumi dan kekayaan mereka diambil dan digunakan oleh masyarakat di pulau Jawa untuk membiayai pembangunan khususnya dalam bidang pembangunan.

Bengkulu memiliki potensi perekonomian yang cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari sektor jasa dan pariwisata, dan sumber daya alam yang dimiliki Kota Bengkulu juga cukup baik. Penulis tertarik untuk meneliti Kota Bengkulu saja dengan keterbatasan potensi daerah tersebut dan karena penulis berasal dari Kota

Bengkulu dan masih tinggal di Kota Bengkulu sampai sekarang. Juga belum ada penelitian tentang pelaksanaan otonomi daerah di Kota Bengkulu.

B. Rumusan Masalah

1. Berapa besar tingkat pertumbuhan pendapatan asli daerah dan transfer pemerintah selama pelaksanaan otonomi daerah di Kota Bengkulu selama periode 2000-2005 bila dilihat dari laju pertumbuhan PAD dan Transfer Pemerintah?
2. Berapa besar tingkat kemampuan keuangan daerah selama pelaksanaan otonomi daerah di Kota Bengkulu selama periode 2000-2005 bila dilihat dari Derajat Otonomi Fiskal Daerah, yakni rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Penerimaan Daerah dan rasio antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Transfer Pemerintah, dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Derajat Otonomi Fiskal Daerah, dan Indeks Kemampuan Rutin Daerah ?

C. Batasan Masalah

Secara umum, apakah suatu daerah sudah menjadi daerah otonom dapat dilihat dari tiga aspek (Hendrik, 2000: 14-16) yakni aspek sarana dan prasarana, pembiayaan, dan personalia. Dalam penelitian ini untuk mengukur kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi, peneliti akan melihat aspek pembiayaan, pertumbuhan PAD dan Transfer Pemerintah, kemampuan keuangan

daerah yang berasal dari DOFD yakni rasio PAD terhadap TPD dan rasio antara PAD terhadap TP, Faktor-faktor yang mempengaruhi DOFD, dan Indeks Kemampuan Rutin Daerah. Dengan demikian peneliti hanya akan melihat struktur penerimaan daerah terutama penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Transfer Pemerintah pusat. Penelitian ini hanya berfokus pada pemerintah Kota Bengkulu dari tahun 2000-2005, karena data ini merupakan data yang terbaru dan tersedia.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa besar tingkat kenaikan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Transfer Pemerintah selama pelaksanaan otonomi daerah di Kota Bengkulu selama periode 2000-2005 bila dilihat dari laju pertumbuhan PAD dan Transfer Pemerintah. Penelitian ini juga ingin mengetahui berapa besar tingkat kemampuan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah di Kota Bengkulu dilihat dari aspek keuangan selama periode 2000-2005 bila dilihat dari DOFD yakni rasio PAD terhadap TPD dan rasio antara PAD terhadap TP, Faktor-faktor yang mempengaruhi DOFD, dan Indeks Kemampuan Rutin Daerah.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Kota Bengkulu

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan di bidang fiskal daerah terutama untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah dalam membiayai pembangunan.

2. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkonsentrasi dalam bidang ekonomi pembangunan, sehingga mereka mampu memperdalam pengetahuannya tentang keuangan daerah. Penelitian ini juga akan menambah referensi bagi fakultas ekonomi khususnya mata kuliah akuntansi sektor publik di Universitas Sanata Dharma.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk memperdalam dan menerapkan beberapa teori selama proses perkuliahan. Antara lain, bahan ini termasuk teori pengantar ekonomi pembangunan dan pengantar ekonomi makro ke dalam praktek yang sesungguhnya.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini akan menjelaskan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan otonomi daerah. Kemudian membahas mengenai perkembangan pemikiran otonomi daerah, kemampuan keuangan daerah, manajemen keuangan daerah, pendapatan asli daerah, transfer pemerintah, dan derajat otonomi fiskal daerah.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, data yang diperlukan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : Gambaran Umum Pemerintah Kota Bengkulu

Bab ini berisi tentang situasi dan kondisi Kota Bengkulu secara umum. Hal ini meliputi sejarah singkat berdirinya Kota Bengkulu, kondisi geografis, iklim, pemerintah daerah, pembagian wilayah, kependudukan, tenaga kerja, transportasi, pos dan telekomunikasi, kekayaan alam, nilai-nilai budaya, dan ekonomi.

BAB V : Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang deskripsi data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB VI : Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisis penelitian, serta saran yang diperlukan yang berkaitan dengan analisis kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah di Kota Bengkulu.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Otonomi Daerah

Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu *autos* yang berarti sendiri dan *nomos* yang berarti undang-undang (Tumilar, 1997: 10).

Menurut Kartasasmita (1996: 346) adalah "pemberian kewenangan dalam mengambil keputusan dan pengelolaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Substansi apa yang dikelola dalam suatu daerah otonom dan bagaimana mengelolanya sangat ditentukan oleh sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi, kemampuan teknis dan manajerial, tata nilai dan tradisi serta kelembagaan yang mengakar dan berkembang dalam suatu daerah yang kondisinya tidak selalu seragam dibandingkan dengan daerah lain.

Menurut UU No.22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004, menyebutkan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tersebut, ada beberapa pedoman pemberian otonomi kepada daerah (Umbara, 2004):

1. Penyelenggaraan otonomi daerah aspek demokratis, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.

2. Pelaksanaannya berdasarkan otonomi luas, nyata, dan bertanggungjawab.
3. Otonomi yang luas dan utuh diletakkan pada propinsi (propinsi bukan atasan kabupaten dan kota).
4. Sesuai dengan konstitusi dan keserasian pusat, daerah, dan antar daerah.
5. Wilayah administratif dan kawasan pembinaan khusus dihapus.
6. Meningkatkan peran legislatif sebagai pengawas maupun fungsi anggaran.
7. Asas dekonsentrasi dilaksanakan pada daerah propinsi dalam kedudukan sebagai wilayah administratif.
8. Asas perbantuan dimungkinkan.

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor.22 Tahun 1999 mengenai prinsip otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab yaitu (Umbara, 2004) :

1. Otonomi luas, berarti keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintah yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan kecuali di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan di bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
2. Nyata berarti keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah.

3. Otonomi yang bertanggungjawab adalah perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tujuan pemberian otonomi daerah (Maskun, 2001: 224) :

1. Agar daerah dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
2. Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan.
3. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pelaksana pembangunan daerah.

Sasaran otonomi daerah (Maskun, 2001: 224) adalah Daerah Tingkat II yang lebih mengetahui perasaan, aspirasi, potensi dan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

Indikator keberhasilan otonomi daerah (Silalahi, 2001: 12) :

1. Masing-masing daerah tingkat II mampu mengurus rumah tangganya sendiri.

2. Semua urusan pemerintah yang berdasarkan kriteria yang ditetapkan dan layak untuk diserahkan kepada daerah tingkat II telah dilaksanakan.
3. Perangkat peraturan pemerintah tentang penyerahan urusan telah ditinjau kembali dan direalisasikan dengan nuansa pembangunan.
4. Pendapatan Asli Daerah meningkat memungkinkan untuk mendorong secara seimbang sesuai dengan kebutuhan dan dapat memungkinkan terjadinya pertumbuhan perekonomian daerah.

B. Perkembangan Pemikiran Otonomi Daerah

Dalam perkembangan, otonomi daerah di Indonesia dalam kurun waktu 1980-2000, dapat dibagi menjadi beberapa periode yang mana mempunyai karakteristik sendiri. Periodisasi tersebut adalah (Bastian, 2001: 228):

1. Periode 1980-1985

Walaupun Undang-Undang No.5 Tahun 1974 telah mengisyaratkan tetapi realisasinya dimulai pada awal tahun 1980, yaitu dengan ditandai dengan terbentuknya kotamadya yang hanya bersifat administratif saja.

2. Periode 1986-1990

Periode ini ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang titik berat penyelenggaraan otonomi

daerah Dati II yang sebelumnya didahului dengan perumusan mengenai persiapan otonomi daerah pada Dati I dan Dati II.

3. Periode 1991-1997

Periode ini mulai lebih ditegaskan realisasi pelaksanaan otonomi daerah Tingkat II yaitu dengan dilaksanakannya proyek percontohan otonomi daerah Dati II.

4. Periode 1998 – sampai dengan sekarang

Bergulirnya reformasi membawa angin segar bagi pelaksanaan otonomi daerah yang seutuhnya.

C. Kemampuan Keuangan Daerah

1. Pengertian Keuangan Daerah

Dalam upaya meningkatkan peran dan kemampuan daerah terhadap pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah dituntut lebih mandiri dalam mengatur seluruh komponen pembiayaan rumah tangga daerah secara maksimal sebab masalah keuangan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah.

Dalam otonomi daerah, adapun ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber keuangan sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintahan pusat harus seminimal mungkin, sehingga Pendapatan Asli Daerah harus menjadi bagian sumber

keuangan besar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah sebagai prasyarat mendasar dalam sistem pemerintahan negara.

Pengertian Keuangan Daerah menurut Supriatno (1993: 1974) adalah:

Kemampuan daerah untuk mengelola mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi dan tugas pembantuan daerah yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Keuangan Daerah menurut Mamesah (1995: 16) adalah:

Semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Asas-Asas Keuangan Daerah

Asas-Asas Keuangan Daerah (Mamesah, 1995: 35-36) :

a. Desentralisasi

Penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya yang menyangkut penentuan kebijaksanaan, perencanaan, pelaksanaan, dan menyangkut segi-segi pembiayaannya.

b. Dekonsentrasi

Pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat daerah.

c. Tugas Pembantuan

Tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

3. Lingkup Keuangan Daerah

Lingkup Keuangan Daerah (Mamesah, 1995: 21-22) :

- a. Kekayaan daerah yang secara langsung dikelola oleh pemerintah daerah sesuai tingkat otonominya masing-masing serta berhubungan langsung dengan pelaksanaan tugas, wewenang tanggung jawab baik dalam bidang pemerintahan maupun dalam bidang pembangunan.
- b. Kekayaan milik daerah yang dipisahkan yaitu seluruh uang dan barang yang pengurusannya tidak dimasukkan ke dalam APBD, tetapi diselenggarakan oleh perusahaan daerah yang juga berfungsi sebagai kas daerah.

4. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah

Secara konseptual, pola hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, harus dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintah dan pembangunan, walaupun pengukuran kemampuan keuangan daerah dapat menimbulkan perbedaan. Ada empat pola hubungan yang memperkenalkan "Hubungan Situasional" yang dapat digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama pelaksanaan Undang-Undang No.25

Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Halim, 2004: 188-189) yaitu:

1. Pola hubungan instruktif

Dalam pola ini, peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).

2. Pola hubungan konsultatif

Dalam pola ini, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi.

3. Pola hubungan partisipatif

Dalam pola hubungan ini, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan, tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.

4. Pola hubungan delegatif

Dalam pola hubungan ini, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Bertolak dari teori tersebut, untuk melihat pola hubungan daerah dengan kemampuan keuangan daerah dilihat dari sisi keuangan dapat ditampilkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.1
Pola Hubungan dan
Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Rendah sekali	0 - 25	Instruktif
Rendah	25 – 50	Konsultatif
Sedang	50 – 75	Partisipatif
Tinggi	75 - 100	Delegatif

Sumber: Halim, 2004:189

D. Manajemen Keuangan Daerah

1. Pengertian Manajemen Keuangan Daerah

Manajemen Keuangan Daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam bidang keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian keuangan.

Penerapan prinsip *good governance* menuntut adanya reformasi manajemen keuangan pemerintah. Reformasi tersebut diperlukan untuk dapat menghasilkan suatu manajemen keuangan pemerintah yang transparan, akuntabel yang mendukung peningkatan peran serta masyarakat dan supremasi hukum di bidang keuangan negara dan meningkatkan kinerja pemerintah.

Reformasi manajemen keuangan daerah perlu dilakukan secara menyeluruh sejak di proses perencanaan, penganggaran, perbendaharaan, akuntansi, sistem informasi dan audit. Hal ini sangat penting untuk dipahami bersama karena reformasi

yang tidak sepenuhnya hanya akan menghasilkan output yang tidak optimal, jika tidak ingin dikatakan gagal.

2. Sumber Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber keuangan organisasi pemerintah berbeda dengan organisasi komersial, sehingga pertanggungjawabannya juga berbeda. Sumber keuangan pemerintah umumnya berasal dari pajak, pengeluaran obligasi, subsidi, bantuan, pinjaman, dan transfer antar unit pemerintah.

Pemerintah pusat kini sedang menyiapkan Rancangan Undang-Undang pengganti UU No. 25 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Beberapa klausul yang akan direvisi adalah menyangkut masalah pinjaman daerah, dan terkait dengan kedudukan Dana Alokasi Umum (DAU). RUU tersebut menyebutkan bahwa pemerintah akan menetapkan batas maksimal kumulatif pinjaman Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pemda) tidak melebihi 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pemda juga diwajibkan memenuhi persyaratan jumlah kumulatif pokok pinjaman daerah yang wajib dibayar tidak melebihi 75% dari jumlah Penerimaan Umum APBD tahun sebelumnya dan hanya dapat menerbitkan obligasi Rupiah. Terakhir, Pemda tidak diijinkan menarik pinjaman luar negeri secara langsung. Sedangkan terkait dengan masalah kedudukan DAU disebutkan bahwa pemerintah akan menghapus DAU bagi daerah-daerah kaya. Nantinya, DAU hanya diperkenankan bagi daerah yang memiliki kapasitas fiskal lebih rendah atau sama dengan kebutuhan. Dengan demikian, formula DAU nantinya dihitung berdasarkan celah fiskal antara provinsi, kabupaten, dan kota (Sunarsip, 2004).

Berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 22 Tahun 1999, penyelenggaraan pemerintah daerah dibiayai dari dan atas beban APBD:

a. Sumber Pendapatan Asli Daerah, terdiri atas:

1. Hasil pajak daerah
2. Hasil retribusi daerah

Ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam retribusi daerah (Yasinta, 2004) yaitu :

- 2.1 Adanya pelayanan langsung yang sebagai imbalan pungutan yang dikenakan.
 - 2.2 Terdapat kebebasan dalam memilih pelayanan.
 - 2.3 Ongkos pelayanan tidak melebihi dari pungutan yang dikenakan untuk pelayanan yang diberikan.
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

b. Dana perimbangan

1. Bagian daerah dari Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam;
2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Ada beberapa hambatan dalam klausul DAU, diantaranya rencana penghapusan DAU bagi daerah-daerah kaya, telah

mengundang protes sejumlah daerah, khususnya daerah yang masuk dalam kategori daerah kaya.

Persoalan transfer sejak dulu memang telah ramai diperdebatkan. Sebagai contoh, ketika perhitungan DAU tahun 2002 dengan menggunakan formula DAU, usulan pemerintah ternyata didapatkan kenyataan bahwa beberapa daerah mengalami penurunan DAU dibandingkan dengan DAU 2001 (Sunarsip, 2004: 3).

Dari berbagai kejadian ini, terlihat bahwa mekanisme DAU yang diharapkan dapat berperan sebagai *equalizing grant* belum berjalan baik. Dengan demikian, bila pemerintah ingin menghapuskan DAU bagi daerah kaya dalam arti daerah yang tidak memiliki celah fiskal, sesungguhnya hal yang wajar dan bukan hal yang baru. Dan secara konsep memang seharusnya jika suatu daerah tidak memiliki celah fiskal, maka baginya tidak layak untuk mendapatkan DAU.

Berdasarkan konsep celah fiskal, distribusi DAU kepada daerah-daerah yang memiliki kemampuan relatif besar akan lebih kecil dan sebaliknya daerah –daerah yang mempunyai kemampuan keuangan relatif kecil akan memperoleh DAU yang relatif besar (Sunarsip, 2004: 3).

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari sistem transfer di Indonesia. Mungkin ada baiknya jika peranan DAU sebagai favorit perlu digeser, sebagai upaya mengejar ketertinggalan daerah dalam penyediaan sarana publik, justru peranan DAK ke depan perlu ditingkatkan sebagai favorit. DAU umumnya terdiri dari *unconditional grant*, *general purpose grant*, dan *block grant*. Artinya, daerah memiliki keleluasaan penuh dalam memanfaatkan dana transfer sesuai dengan pertimbangannya sendiri atau sesuai dengan aturan yang menjadi prioritas daerahnya. Kelemahan DAU dapat ditutup oleh DAK. Tipikal DAK adalah *conditional grant*, *categorical grant*, and *specific purpose grant*. Dimana DAK harus digunakan sesuai dengan kebutuhan khusus yang telah ditentukan atau disepakati oleh Pemerintah dan Daerah (Sunarsip, 2004: 4).

C. Pinjaman Daerah.

UU No. 25 Tahun 1999 memberikan keleluasaan kepada Pemda untuk dapat melakukan pinjaman daerah. Untuk lebih menguatkan kedudukan pinjaman daerah, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 107/2000 tentang Pinjaman Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut menyebutkan bahwa Pemda bisa melakukan pinjaman secara langsung ke luar negeri (bilateral maupun multilateral).

Namun dalam perkembangannya, pokok-pokok ketentuan ini ternyata tidak jalan. Bahkan, dalam praktiknya peta pinjaman daerah tidak berubah dibandingkan dengan kondisi sebelum UU No. 25/1999 dan PP. 107/2000. Kini, klausul tentang pinjaman daerah pada UU No.25/1999 akan direvisi. Implikasinya, karena Pemda tidak lagi diperkenankan melakukan pinjaman luar negeri secara langsung, maka hal ini akan mengubah secara fundamental kedudukan pinjaman daerah (Sunarsip, 2004: 1).

Di atas disebutkan bahwa RUU pengganti UU No.25/1999 akan mengembalikan pinjaman daerah kembali pada mekanisme sebelum UU No.25/1999. Berdasarkan sumbernya, sebagian besar pinjaman daerah yang telah berjalan sejak 1970-an ini berasal dari Pemerintah, yaitu dilakukan melalui mekanisme *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) DAN Rekening Pembangunan Daerah (RPD).

SLA merupakan pinjaman daerah yang bersumber dari lembaga multilateral seperti Bank Dunia (IBRD) dan Badan Pembangunan Asia (ADB), serta dapat pula dari pinjaman bilateral antara lain dari Amerika Serikat (USAID), Jerman (KFW), Jepang (OECF), Swiss, Belanda, dan Perancis yang selama ini diarahkan untuk membiayai penyediaan *basic infrastructure* melalui program pembangunan prasarana kota terpadu (P3KT) atau dikenal dengan istilah *urban development project* (UDP). Sedangkan RPD merupakan

sumber dana pinjaman bagi Pemda/BUMN dengan dana yang berputar dari hasil pembayaran pinjaman luar negeri (Sunarsip, 2004: 2).

Berdasarkan data dari Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman (DP3), sejak 1978 hingga 1999, ternyata kinerja SLA dan RPD kurang memuaskan, baik dari sisi penggunaannya maupun tingkat pengembaliannya.

Rendahnya tingkat penggunaan pinjaman daerah serta tidak optimalnya penggunaan dana pinjaman dari sumber komersial menunjukkan bahwa Pemda memiliki kelemahan dalam mengoptimalkan basis-basis penerimaan mereka. Studi Alisyahbana, dkk (2002) memperlihatkan alasan dibalik kecilnya peranan pinjaman ini:

1. Di masa lalu, Pemda di Indonesia memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap investasi langsung dari pemerintah, baik itu melalui mekanisme DIP maupun INPRES.
2. Adanya kebijakan dari pemerintah yang membatasi Pemda melakukan pinjaman.
3. Pemda sendiri lebih berhati-hati melakukan pinjaman.
4. Pengembangan pasar modal belum memadai dalam mengakomodasi kebutuhan Pemda untuk melakukan pinjaman.

Tingginya tingkat tunggakan pinjaman daerah antara lain disebabkan oleh beberapa fakta berikut:

1. Tidak adanya justifikasi kelayakan proyek secara memadai, kurangnya analisis kebutuhan yang tepat, kurangnya *design* secara teknis, lokasi investasi yang tidak tepat, metodologi analisis keuangan yang tidak benar.
2. Ketidakmampuan DP3 untuk mengevaluasi ketaatan pinjaman secara tepat.
3. Adanya peminjam yang sebelumnya menjadi pelanggan, namun oleh pemerintah tetap diijinkan untuk mendapatkan pinjaman.
4. Tidak adanya kewajiban yang tertulis di dalam perjanjian yang mewajibkan peminjam untuk menyediakan provisi.
5. Kurangnya pemantauan selama implementasi proyek dan komunikasi selama periode pembayaran kembali pinjaman.
6. Kebanyakan proyek yang dibiayai dengan pinjaman didorong suatu keinginan untuk memperbanyak persediaan infrastuktur, bukan oleh sebuah analisis yang didasarkan pada kebutuhan yang riil di masyarakat.
7. Tambahan pinjaman SLA kepada peminjam lama seringkali tidak disertai dengan evaluasi yang tepat.
8. Pinjaman SLA yang berasal dari sumber bilateral, biasanya sudah terikat oleh suatu perjanjian pinjaman bilateral hingga ke detail teknis proyek.

9. Kurangnya keterlibatan DP3 dalam persiapan, persetujuan, dan penilaian proyek.

D. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, contohnya penerimaan dari propinsi, kabupaten/kota, dan dana kontijensi.

E. Pendapatan Asli Daerah

Pengertian Pendapatan Asli Daerah menurut Azhari, (1995: 51) adalah sumber-sumber pendapatan daerah yang dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan dan merupakan pendapatan yang sah. Menurut Ismanthoro (2003: 124), Pendapatan Asli Daerah merupakan keuangan daerah yang berasal dari potensi daerah sendiri dan bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan daerah, dinas daerah, dan lain-lain usaha yang sah.

Undang-Undang No.25 Tahun 1999 menyebutkan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi komponen hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah sangat berperan dan menjadi salah satu sumber yang paling dominan karena kemampuan suatu daerah dalam membiayai urusan rumah tangganya dapat dilihat dari besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah dan Derajat Otonomi Fiskal Daerah merupakan tolak ukur pelaksanaan otonomi daerah, dimana semakin banyak kegiatan daerah yang dibiayai oleh Pendapatan Asli Daerah, berarti semakin tinggi kualitas otonomi suatu

daerah dan semakin tinggi derajat otonomi fiskal daerah memperlihatkan kesiapan suatu daerah dalam berotonomi (Tumilar, 1997: 31).

F. Transfer Pemerintah

Transfer Pemerintah, istilah lainnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Sumbangan dan Bantuan. Dalam Realisasi Penerimaan sebelum otonomi daerah, istilah Transfer Pemerintah ditulis dengan nama rekening bagian Sumbangan dan Bantuan. Sedangkan dalam Realisasi Penerimaan setelah otonomi daerah, istilah Transfer Pemerintah ditulis dengan nama rekening Bantuan Dana Kontijensi. Sumbangan adalah pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah propinsi serta sumbangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Jenis sumbangan antara lain: subsidi bantuan penyelenggaraan Sekolah Dasar negeri, subsidi atau perimbangan keuangan, subsidi bantuan biaya operasional Rumah Sakit Umum Daerah, subsidi pengembangan objek wisata, dan lain-lain.

Bantuan adalah sejenis bantuan atas Instruksi Presiden yang digunakan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi. Secara umum, bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dibedakan dalam dua macam (Halim, 2004: 52-54):

- a. Bantuan umum (*general grant / unconditional grant*)
- b. Bantuan khusus (*specific grant / conditional grant*)

Di Indonesia, bantuan yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari dua kategori, yaitu: (Hendrik, 2000: 27)

- a. Subsidi daerah otonom, terdiri dari belanja pegawai, belanja non pegawai yang diarahkan, dan belanja pegawai yang ditetapkan, yakni subsidi atau bantuan daerah dan ganjaran.
- b. Bantuan pembangunan daerah (Bantuan Inpres), terdiri dari bantuan umum berupa bantuan pembangunan propinsi, kabupaten, dan desa; bantuan khusus berupa bantuan penunjang jalan dan jembatan kabupaten, bantuan pembangunan sarana kesehatan dan bantuan penghijauan/reboisasi.

Bantuan pembangunan dalam bentuk bantuan umum, pemerintah daerah berwenang menentukan untuk apa bantuan tersebut digunakan, asal dipergunakan untuk sektor-sektor yang tepat sesuai dengan program yang telah disetujui sebelumnya. Bantuan yang bersifat khusus, pemerintah pusat menetapkan prioritas dan pembagian dana, sementara pemerintah daerah berwenang dalam hal penentuan lokasi proyek dan cara pelaksanaannya. Bantuan dari pemerintah pusat sesungguhnya berfungsi sebagai alat yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah sehingga Pendapatan Asli Daerah dapat semakin meningkat. Hakekat bantuan adalah untuk memperkuat tingkat otonomi suatu daerah, maka daerah perlu memiliki kebebasan dalam menggunakan dana bantuan sesuai kebutuhan masing-masing daerah, sehingga berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah dan peningkatan pelayanan masyarakat.

G. Derajat Otonomi Fiskal Daerah

Otonomi Fiskal merupakan salah satu aspek penting dari otonomi daerah secara keseluruhan menurun. Hal ini disebabkan adanya pengertian otonomi fiskal daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, seperti pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan milik daerah dan lain-lain pendapatan yang sah (Tumilar, 1997: 12). Harus diakui derajat otonomi fiskal daerah di Indonesia masih rendah, yang tercermin dari Indeks Kemampuan Rutin Daerah masing-masing daerah baik kabupaten maupun propinsi seluruh Indonesia. Artinya bahwa Pendapatan Asli Daerah dari masing-masing daerah belum mampu membiayai pengeluaran rutin.

Pengukuran derajat otonomi fiskal daerah menjelaskan mengenai kemampuan suatu daerah dalam membiayai urusan rumah tangga dengan menghitung rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Penerimaan Daerah tanpa transfer (Radianto, 1997: 47). Melalui struktur pengeluaran daerah, derajat otonomi keuangan tercermin dalam angka Indeks Kemampuan Rutin yaitu proporsi antara Pendapatan Asli Daerah dengan pengeluaran rutin tanpa transfer pemerintah pusat (Kuncoro, 1995: 9 dan Radianto, 1997: 42)

Derajat otonomi fiskal menjelaskan mengenai kemampuan suatu daerah dalam membiayai program pembangunannya berdasarkan Pendapatan Asli Daerah. Ukuran yang digunakan untuk mengukur derajat otonomi fiskal daerah dilihat dari struktur penerimaan daerah dengan menggunakan *administrative independency ratio*, yaitu rasio antara Pendapatan Asli Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Rasio yang dimaksud berkisar 0 – 1 , semakin mendekati 1 derajat otonomi fiskal daerah semakin tinggi dan begitu juga sebaliknya. Melalui stuktur pengeluaran daerah, derajat otonomi keuangan tercermin melalui angka Indeks Kemampuan Rutin, yaitu proporsi antara pendapatan asli daerah dan pengeluaran rutin (Kuncoro, 1995: 9).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus pada Pemerintah Kota Bengkulu selama periode 2000-2005. Data diambil di Biro Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah, dan Biro Pusat Statistik Kota Bengkulu. Penelitian ini bersifat formal, yaitu dengan menganalisis masalah yang ada saat sebelum dan sesudah pelaksanaan otonomi daerah. Metode pengumpulan datanya dengan observasi, melalui dokumentasi yaitu dengan menganalisis tentang Pendapatan Asli Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Pengeluaran Rutin lainnya. Hubungan antar variabel bersifat *ex post facto*, dengan melihat dan menganalisis fakta yang terjadi dan data yang sudah ada. Menurut tujuan pokok penelitian, penggambarannya secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan dampak dari Undang-Undang otonomi daerah, apakah ada perbedaan besar sebelum dan sesudah otonomi daerah. Dimensi waktunya secara longitudinal yaitu dengan mengukur waktu yang lama, tidak hanya pada satu waktu saja. Dalam hal ini, peneliti mengukur kemampuan keuangan daerah Kota Bengkulu selama lima tahun. Lingkungan penelitian dengan studi lapangan yaitu dengan melihat apa yang terjadi pada masyarakat. Menurut persepsi penelitian oleh subjeknya, termasuk situasi biasa yaitu dengan tidak mengganggu responden.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian : Badan Pengelola Keuangan Daerah, Biro Pusat Statistik, Pemerintah Daerah Kota Bengkulu
2. Waktu Penelitian : Bulan Februari 2008 sampai Maret 2008

C. Jadwal Penelitian

Penelitian akan berlangsung selama 8 (delapan) bulan yang dimulai sejak bulan September 2007 sampai dengan bulan Maret 2008. Jadwal terperinci akan terlihat dalam tabel di bawah ini :

Bulan Ke	1	2	3	4	5	6	7	8
Keterangan								
Penyerahan Proposal	X	X						
Revisi Proposal		X	X					
Penulisan Proposal Final			X	X				
Penelitian Lapangan					X	X		
Pengolahan Data						X	X	
Analisis Data						X	X	
Penulisan Skripsi							X	

Keterangan :

- Bulan 1 : September
- Bulan 2 : Oktober
- Bulan 3 : November
- Bulan 4 : Desember
- Bulan 5 : Januari

- Bulan 6 : Februari
- Bulan 7 : Maret
- Bulan 8 : April

Penelitian dilakukan dengan mengukur dan menganalisis kemampuan keuangan daerah Kota Bengkulu selama periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2005. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, dimana peneliti mencari data ke Biro Keuangan Daerah, Biro Pusat Statistik dan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu dengan melakukan dokumentasi data statistik dan kemudian menganalisisnya.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian : Pegawai dan pejabat Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) bagian Biro Keuangan Daerah Kota Bengkulu.
2. Objek Penelitian : Pendapatan Asli Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Pengeluaran Rutin Kota Bengkulu selama periode 2000-2005.

E. Data yang diperlukan

Data yang diperlukan adalah data sekunder dengan periode pengamatan 1996/1997 – 1998/1999 sebelum diberlakukannya otonomi daerah tahun 2000, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Total Penerimaan Daerah yakni realisasi penerimaan daerah yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu,

pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak, dan bukan pajak, sumbangan dan subsidi serta penerimaan pembangunan; Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Pengeluaran Rutin Daerah yang digunakan untuk mencari Indeks Kemampuan Rutin selama pelaksanaan otonomi daerah tahun 2000-2005 dengan melihat proyeksi penerimaan dan pengeluaran daerah tahun 2000 sesuai dengan Undang-Undang No.22 dan 25 Tahun 1999 dan PP No.25 Tahun 2000 di Kota Bengkulu.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan yaitu:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*) dilakukan untuk mendapatkan landasan teori yang mendukung penulisan dan disarikan dalam bentuk *literature*/buku-buku karangan ilmiah, buku teks, artikel, website, dokumen pemerintah, dan statistik dari perpustakaan maupun hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
2. Penelitian Lapangan (*field research*) dilakukan dengan cara :
 - a. Wawancara, yaitu dengan cara berdialog dengan staf Pemerintah Daerah, Biro Pusat Statistika dan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Bengkulu.
 - b. Dokumentasi, yaitu dengan melihat dan menganalisa catatan dan laporan mengenai Pendapatan Asli Daerah dan laporan

mengenai penerimaan daerah yang ada di Pemerintah Daerah, Biro Pusat Statistika, dan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Bengkulu.

- c. Observasi, yaitu dengan melakukan peninjauan dan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian sehubungan dengan masalah yang akan diteliti

G. Teknik Analisis Data

1. Alat analisis untuk menghitung laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Transfer Pemerintah menggunakan rumus (Thamrin Simanjuntak, 2003:8)

$$g = \frac{X_t - X_{t-1}}{X_{t-1}} \times 100\%$$

g = rata-rata pertumbuhan masing-masing variabel per tahun

X_t = nilai masing-masing variabel per tahun (misalnya penerimaan pajak atas kendaraan, dan sumber penerimaan lainnya)

X_{t-1} = nilai masing-masing variabel pada tahun sebelumnya

2. Alat analisis untuk menentukan tingkat ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat Kota Bengkulu.

Alat analisis yang digunakan untuk menentukan hubungan fiskal antara pemerintah pusat atau tingkat ketergantungan fiskal yang kuat antar daerah dengan pemerintah pusat adalah dengan:

a. membandingkan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Total Penerimaan Daerah selama periode 2000-2005 di Kota Bengkulu, menggunakan rumus: (Depdagri, RI, 1991)

$$\text{DOFD} = \frac{\text{PADt}}{\text{TPDt}} \times 100\%$$

DOFD = Derajat Otonomi Fiskal Daerah

TPDt = Total Penerimaan Daerah tahun tertentu

PADt = Pendapatan Asli Daerah tahun tertentu

b. membandingkan Pendapatan Asli Daerah dengan Transfer Pemerintah Kota Bengkulu selama periode 2000-2005 menggunakan rumus: (Depdagri, RI, 1991)

$$\text{DOFD} = \frac{\text{PADt}}{\text{TPt}} \times 100\%$$

TPt = Transfer Pemerintah tahun tertentu

Dengan menggunakan rumus diatas, apabila persentase yang didapatkan mendekati angka 100% merupakan indikasi bahwa suatu daerah akan semakin mampu membiayai program pembangunannya dengan mengandalkan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah. Dengan kata lain, tingkat ketergantungan di daerah terhadap pusat semakin rendah.

Demikian pula sebaliknya, apabila persentase yang didapatkan ternyata semakin kecil mengindikasikan bahwa suatu daerah belum mampu membiayai program pembangunannya dengan mengandalkan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap transfer pemerintah pusat semakin tinggi.

Faktor yang mempengaruhi derajat otonomi fiskal daerah, dapat diketahui dengan menggunakan alat analisis dengan model: (Depdagri, RI, 1991)

$$\text{a. PBHP} = \frac{\Sigma \text{BHP}}{\Sigma \text{TPD}} \times 100\%$$

$$\text{b. PSB} = \frac{\Sigma \text{SB}}{\Sigma \text{TPD}} \times 100\%$$

PBHP adalah Peranan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

BHP adalah Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

PSB adalah Peranan Sumbangan dan Bantuan

SB adalah Sumbangan dan Bantuan

TPD adalah Total Penerimaan Daerah

Jika dari perhitungan diatas diketahui bahwa Peranan Sumbangan dan Bantuan dari pemerintah pusat hasilnya kecil, maka tingkat ketergantungan pemerintah kota terhadap pemerintah pusat semakin rendah.

3. Alat analisis untuk mengukur kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pengeluaran rutin daerah Kota Bengkulu menggunakan rumus: (Tumilar, 1997:38)

$$\text{IKRDt} = \frac{\text{TPADt}}{\text{TPRDt}} \times 100\%$$

IKRDt = Indeks Kemampuan Rutin Daerah tahun tertentu

TPADt = Total Pendapatan Asli Daerah tahun tertentu

TPRDt = Total Pengeluaran Rutin Daerah tahun tertentu

Untuk tolak ukur kemampuan rutin daerah adalah rasio antara Pendapatan Asli Daerah memiliki kriteria kemampuan rutin daerah yang dikategorikan sebagai berikut: (Tumilar, 1997:38)

Tabel III.1
Kategori Kemampuan Rutin Daerah

Kisaran	Kemampuan Rutin Daerah
00,00% - 20,00%	Sangat kurang
20,10% - 40,00%	Kurang
40,10% - 60,00%	Cukup
60,10% - 80,00%	Baik
80,10% - 100,00%	Sangat baik sekali

Sumber : Tumilar, 1997:38

Dengan menggunakan rumus diatas apabila semakin tinggi persentase Indeks Kemampuan Rutin Daerah, maka semakin tinggi pula Kota

Bengkulu dalam membiayai kebutuhan rutinnya berdasarkan sumber-sumber keuangan asli daerah.

4. Menentukan derajat otonomi fiskal tertentu

Untuk melihat kemampuan keuangan daerah dilakukan dengan menganalisis secara deskriptif aspek-aspek keuangan dengan menggunakan tolak ukur derajat otonomi fiskal daerah, kemampuan daerah dan proyeksi penerimaan dan pengeluaran daerah pada saat otonomi daerah diberlakukan.

Menurut Depdagri (1991), derajat otonomi fiskal daerah dapat diukur dari dua hal, yaitu: rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Total Penerimaan Daerah yang mencerminkan kemampuan Pendapatan Asli Daerah membiayai pengeluaran dan rasio Pendapatan Asli Daerah kepada pemerintah pusat. Kategori derajat otonomi fiskal daerah adalah :

Tabel.III.2
Kategori Kemampuan Keuangan Daerah

Kisaran	Kemampuan Keuangan Daerah
00,00% - 10,00%	Sangat kurang
10,10% - 20,00%	Kurang
20,10% - 30,00%	Sedang
30,10% - 40,00%	Cukup
40,10% - 50,00%	Baik
> 50,00%	Sangat baik

Sumber : Hendrik, 2000:35

Selama tahun anggaran 1996/1997 – 1998/1999 dan tahun 2000-2005 terjadi perubahan periode tahun anggaran yaitu pada tahun anggaran 2000. Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta realisasinya oleh Pemerintah Kota Bengkulu dimulai 1 April 2000 sampai dengan 31 Desember 2000 atau selama sembilan bulan. Sedangkan tiga bulan sebelumnya yaitu pada tanggal 1 Januari 2000 sampai dengan 31 Maret 2000 dimasukkan ke dalam tahun anggaran 1999/2000 – tahun 2001 dan seterusnya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Singkat Berdirinya Kota Bengkulu

Nama Bengkulu diambil dari kisah perang melawan orang Aceh yang datang hendak melamar Putri Gading Cempaka, yaitu Soak Ratu Agung Raja Sungai Serut, akan tetapi lamaran tersebut ditolak sehingga menimbulkan perang. Suku Soak Dalam, adalah saudara kandung Putri Gading Cempaka yang menggantikan Raja Sungai Serut, saat terjadi peperangan berteriak Empang ka Hulu-Empang ka hulu: yang artinya hadang mereka (orang Aceh) jangan biarkan mereka menginjakkkkan kakinya di tanah kita . Dari kata tersebut lahirlah kata Bangkahulu atau Bengkulu, bangsa Inggris menyebutnya dengan kata Bencoolen.

Wilayah Bengkulu telah didiami penduduk sejak zaman prasejarah, hal ini ditunjukkan dengan ditemukannya prasasti di bagian utara Bengkulu, yaitu bangunan megalitik tipe dongson di bagian selatan Bengkulu. Dalam sejarah Bengkulu terdapat kerajaan-kerajaan kecil yaitu : Selebar, Sungai Serut, Empat Petulai, Indra Pura dan beberapa kerajaan lainnya.

Kerajaan Selebar merupakan salah satu kerajaan di Bengkulu yang telah melakukan perdagangan ke luar negeri yang ditandai adanya perjanjian dengan Perusahaan Hindia Timur Inggris pada tanggal 12 Juli 1685. Dalam perjanjian itu disebutkan bahwa Raja Selebar memberikan hak kepada Inggris untuk membangun

gudang dan benteng, hal ini merupakan salah satu penyebab runtuhnya Kerajaan Selebar.

Pada tahun 1712 Yoseph Collet diangkat menjadi Deputi Gubernur, Ia meminta izin untuk menggantikan benteng York dan membangun sebuah benteng baru di atas karang, sebuah bukit kecil yang menghadap ke laut sekitar 2 Km dari benteng York. Pada tahun 1714 dimulailah pembangunannya dan selesai pada tahun 1718. Yoseph Colet menyebutnya benteng "Malborough" yang merupakan Duke Of Malborough pertama yang diangkat menjadi pahlawan nasional setelah ia memenangkan sejumlah pertempuran melawan Perancis dan musuh-musuh lainnya. Pada masa pemerintahan Thomas Stamford Raffles tahun 1818 – 1824, Bengkulu menjadi terkenal.

Pada Tahun 1825 Inggris yang menguasai Bengkulu melakukan tukar menukar dengan Belanda yang menguasai Malaysia dan Singapura. Belanda selanjutnya menempati benteng Malborough sampai perang dunia II yang pada akhirnya semua wilayah Sumatera diduduki tentara Jepang sampai Jepang menyerah kalah pada tahun 1945. Setelah kemerdekaan RI tahun 1945 benteng tersebut digunakan oleh TNI dan polisi sampai tahun 1970. Setelah kemerdekaan RI Bengkulu merupakan salah satu Keresidenan di Provinsi Sumatera Selatan, baru pada tahun 1968 Bengkulu terwujud menjadi Provinsi yang berdiri sendiri dan lepas dari Provinsi Sumatera Selatan. (depdagri.go.id)

B. Kondisi Geografis

Kota Bengkulu terletak antara 2 derajat 16 menit – 3 derajat 31 menit LS dan 101 derajat 01 menit – 103 derajat 41 menit BT dengan luas 144,52 Km².

Kota Bengkulu terletak di sebelah barat pegunungan Bukit Barisan. Wilayah Kota Bengkulu memanjang dari perbatasan Provinsi Sumatera Barat sampai ke perbatasan Provinsi Lampung dan jaraknya lebih kurang 567 km. Kota Bengkulu di sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat, di sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia dan Provinsi Lampung, di sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia dan di sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatan.

Sebagian besar jenis tanahnya adalah tanah Asosiasi Podsolik Merah Kuning – Latosol. Secara garis besar Kota Bengkulu adalah dataran rendah. Di Kota Bengkulu mengalir kurang lebih 130 sungai dan anak sungai. Sungai – sungai yang mengalir di Kota Bengkulu bermuara ke Samudera Indonesia. Sesuai dengan kondisi topografinya yang berbukit – bukit dan terjal, aliran sungai di Kota Bengkulu umumnya deras dan berjeram, sehingga berpotensi untuk dijadikan sebagai sumber pembangkit listrik tenaga air berskala kecil, yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga maupun untuk kegiatan usaha rumah tangga di daerah sekitar aliran sungai.

Jarak dari Kota Bengkulu ke beberapa tempat penting lainnya seperti :

Benteng Marlborough : 2 km

Monumen Parr dan Hamilton : 2 km

Pantai Panjang : 2 km

Rumah Pengasingan Bung Karno : 1,5km

Tapak Paderi dan Pantai Jakat : 2 km

Secara administratif Kota Bengkulu terdiri dari 8 kecamatan dan 52 kelurahan dengan batas wilayah:

Sebelah utara : Kabupaten Bengkulu Utara

Sebelah Timur : Kabupaten Bengkulu Utara

Sebelah Selatan : Kabupaten Bengkulu Selatan

Sebelah Barat : Samudera Indonesia

C. Iklim

Secara umum, curah hujan tertinggi tahun 2006 terjadi pada bulan Januari, yaitu sebanyak 219mm dan terendah pada bulan Mei, Agustus-November (1-76mm). Rata-rata hari hujan per bulan adalah 16 hari.

Kelembapan udara rata-rata cukup tinggi tahun 2006 terjadi pada bulan Januari sebesar 87% dan terendah pada bulan Agustus sebesar 80%. Suhu udara tahun 2006 rata-rata 31-33derajat Celcius.

D. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah dan beserta perangkat daerah lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah. Pemerintah Kota Bengkulu dipimpin oleh

seorang Walikota sebagai Kepala Eksekutif yang dibantu oleh seorang Wakil Walikota.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Badan Legislatif Daerah. DPRD Kota Bengkulu masa bhakti Tahun 1999 - 2004 terdiri dari 30 orang anggota yang berasal dari 6 fraksi.

E. Pembagian Wilayah

Kota Bengkulu terdiri dari 8 kecamatan, 52 kelurahan, 256 RW dan 969 RT dengan luas wilayah 145 km.

Tabel IV.1
Jarak antara Balai Kota Bengkulu
Dengan Kantor Kecamatan

Kecamatan	Jarak (km)
Gading Cempaka	6
Teluk Segara	2
Selebar	10
Sungai Serut	1,5
Kampung Melayu	16
Ratu Agung	2
Muara Bangkahulu	5
Ratu Samban	3

*Sumber: Monografi Kecamatan Se-Kota Bengkulu
Dalam BPS Kota Bengkulu*

F. Kependudukan

Berdasarkan Sensus Penduduk 2006, penduduk Kota Bengkulu berjumlah 261.610 orang terdiri dari 133.350 orang laki – laki dan 128.260 orang perempuan.

Secara keseluruhan jumlah penduduk laki – laki lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki – laki. Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki – laki dengan penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Kota Bengkulu adalah daerah yang paling padat penduduknya dibandingkan kabupaten lainnya di Propinsi Bengkulu. Kepadatan penduduk di Kota Bengkulu pada tahun 2006 sebesar 1.810 jiwa/kilometer persegi.

Tabel IV.2
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Per Kecamatan Tahun 2006
(Dalam Ribuan)

Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
Selebar	9,45	9,21	18,66
Kampung Melayu	14,17	13,97	28,14
Gading Cempaka	37,07	36,02	73,09
Ratu Agung	24,41	24,27	48,68
Ratu Samban	13,77	13,66	27,43
Teluk Segara	11,22	10,11	21,33
Sungai Serut	8,53	7,60	16,13
Muara Bangkahulu	14,73	13,42	28,15

Sumber: BPS Kota Bengkulu

Tabel IV.3
Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Di Kota Bengkulu Tahun 2006

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	11.639	12.875	24.514
5-9	12.154	11.433	23.587
10-14	12.463	14.832	27.295
15-19	14.729	16.171	30.900
20-24	15.553	16.892	32.445
25-29	12.051	11.021	23.072
30-34	8.549	10.609	19.158
35-39	8.961	9.785	18.746
40-44	9.579	9.373	18.952
45-49	9.167	6.901	16.068
50-54	7.622	5.871	13.493
55-59	2.678	1.854	4.532
60-64	927	2.060	2.987
+65	3.296	2.575	5.871
Jumlah	129.368	132.252	261.620

Sumber: BPS Kota Bengkulu

G. Tenaga Kerja

Jumlah tenaga kerja di Kota Bengkulu pada tahun 2006 diperkirakan sebanyak 1,13 juta orang. Tenaga kerja adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir atau pada kurun waktu 2004 – 2006 jumlah tenaga kerja di Kota Bengkulu cenderung meningkat. Jumlah tenaga kerja di Kota Bengkulu pada kurun waktu 2004 – 2005 meningkat sebesar 2,02 persen dan pada kurun waktu 2005 – 2006 jumlahnya meningkat sebesar 5,80 persen. Secara total pada kurun waktu 2004 – 2006 jumlah tenaga kerja di Kota Bengkulu mengalami peningkatan sebesar 7,93 persen.

H. Transportasi

Panjang jalan di seluruh wilayah Kota Bengkulu pada tahun 2006 mencapai 683.143 km dengan rincian : 425.559 km jalan yang sudah diaspal, 7.303 km jalan tanah, dan 250.281 km jalan diperkeras. Panjang jalan yang berada di bawah kewenangan Negara 36,44 km, sedangkan 1.500,29 km berada di bawah kewenangan Kota Bengkulu. Kondisi jalan secara umum dapat dikatakan layak untuk dilalui 68,53 persen kondisi jalan baik, 65,08 persen kondisi jalan sedang, dan 21,20 persen kondisi jalan rusak.

I. Pos dan Komunikasi

Jumlah warung telekomunikasi (wartel) di wilayah Kota Bengkulu pada akhir tahun 2006 sebanyak 2.402 wartel, yang terbagi ke dalam tiga wilayah stasiun telepon otomatis. Di wilayah stasiun otomatis simpang lima 1.051 wartel, padang harapan 884.090 wartel, dan pagar dewa 466.910 wartel. Sedangkan jumlah telepon umum yang ada di tiga wilayah stasiun otomatis tersebut mencapai 347 sambungan telepon umum kartu dan 176 sambungan telepon umum koin.

Lalu lintas surat pos dan giro selama kurun waktu 2006 mencapai 13.966 ribu surat yang dikirim melalui kantor pos yang ada di wilayah Kota Bengkulu. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya surat yang dikirim naik 14 persen.

Sarana komunikasi radio merupakan sarana komunikasi elektronik missal yang sampai saat ini masih banyak digemari. Terdapat 9 stasiun radio swasta di Kota Bengkulu pada tahun 2006.

J. Kekayaan Alam

Potensi Sumber Daya Alam yang dimiliki oleh Kota Bengkulu relatif terbatas baik tanah, air, maupun kandungan mineral yang tersimpan dalam perut bumi. Kendati demikian beranjak dari potensi alam yang terbatas, Kota Bengkulu mampu mengembangkan sektor-sektor ekonomi lainnya untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang terus meningkat. Kekayaan alam tersebut adalah :

1. Tanah

Jenis tanah yang terdapat di wilayah Kota Bengkulu adalah tanah Asosiasi Podsolik Merah Kuning – Latosol. Penguasaan tanah di Kota Bengkulu dikategorikan menjadi dua, yaitu : tanah yang dikuasai oleh masyarakat dan tanah yang dikuasai oleh Negara. Tanah yang dikuasai oleh masyarakat adalah tanah yang diwarisi secara turun temurun yang pada umumnya telah dimanfaatkan untuk lahan pemukiman, pertanian dan perkebunan. Tanah yang dikuasai oleh Negara adalah tanah untuk kawasan hutan dan tanah untuk kepentingan umum seperti tanah untuk saluran irigasi, jalan, lapangan olah raga, kuburan, dan lain – lain.

2. Air

Kondisi sumber daya air di Kota Bengkulu meliputi air hujan, air permukaan dan air tanah. Air permukaan dimanfaatkan untuk pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan, dan untuk kepentingan lainnya. Air tanah dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga, perkantoran,

perhotelan, dan industri lainnya yang berhubungan dengan kehidupan manusia.

3. Flora dan fauna

Hutan tropis Kota Bengkulu memiliki sumber kekayaan flora dan fauna yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata. Kekayaan flora yang cukup menarik dan berpotensi untuk dijadikan objek wisata hutan karena kelangkaannya, yaitu bunga *Rafflesia Arnoldi*, bunga anggrek *Vanda*, dan kayu Merbabu. Jenis binatang meliputi harimau sumatera, siamang, tapir, kerbau liar, rusa, serta penangkaran gajah sumatera.

4. Bahan Tambang

Bahan tambang yang terdapat di Kota Bengkulu adalah batubara, besi, logam, emas, perak, dan sebagainya.

K. Nilai-nilai Budaya

Bengkulu terkenal dengan adanya bunga raksasanya, yakni bunga *Rafflesia Arnoldi*. Bengkulu juga dikenal sebagai kota kebudayaan yang mempunyai pengaruh besar terhadap daerah di sekelilingnya. Kebudayaan tersebut adalah

1. Kesenian

Kota Bengkulu banyak menghasilkan berbagai bentuk kesenian yang memberikan ciri khasnya terutama berbagai macam tradisi seperti Festival tari Selamat Datang, Upacara Pernikahan, Upacara Kematian, Sedekah Rame yang dilakukan oleh petani, Buang Jung yang dilakukan oleh

masyarakat di pesisir pantai. Bentuk seni tari diantaranya yaitu tari Sekapur Sirih, dan sebagainya.

Salah satu upacara tradisional di Kota Bengkulu adalah upacara Tabot yaitu suatu perayaan tradisional yang dilaksanakan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 Muharam setiap tahunnya untuk memperingati gugurnya Hasan dan Husen cucu Nabi Muhammad SAW oleh keluarga Yalid dari kaum Syiah, dalam peperangan di Karbala pada tahun 61 Hijriah. Pada perayaan Tabot tersebut dilaksanakan berbagai pameran serta lomba ikan-ikan, telong-telong serta kesenian lainnya yang diikuti oleh kelompok-kelompok kesenian yang ada di Kota Bengkulu sehingga menjadikan ajang hiburan rakyat dan menjadi salah satu kalender wisata tahunan.

2. Pakaian Adat

Berdasarkan fungsinya terbagi menjadi pakaian adat keseharian dan pakaian adat upacara. Pakaian adat keseharian biasanya dilengkapi oleh sandal atau sepatu yang terbuat dari kayu-kayuan, kopiah atau topi atau ikat kepala untuk wanita. Pakaian adat upacara cowok biasanya menggunakan jas tertutup, kain songket, celana batas lutut, kalung bersusun dan mahkota dengan gunjai-gunjai, sedang untuk wanita menggunakan baju kurung, kain songket, mahkota dengan gunjai-gunjai, kalung.

3. Senjata

Senjata tradisional Kota Bengkulu berbentuk :

- a. Panah yang terbuat dari kayu, rotan, ataupun bambu

b. Keris, terbuat dari besi dengan pegangan yang artistik dan biasanya digunakan oleh Ketua Adat atau Hulu Balang

c. Siwar

d. Rudus, semacam pedang yang digunakan ketika mempromosikan Ketua adat

4. Bangunan

Jenis bangunan Tradisional di Kota Bengkulu berbentuk rumah panggung. Rumah panggung ini dirancang untuk melindungi penghuninya dari banjir. Di samping itu kolong rumah panggung juga dapat digunakan untuk menyimpan gerobak, hasil panen, alat – alat pertanian, kayu api, dan juga berfungsi sebagai kandang hewan ternak.

L. Ekonomi

Pertumbuhan dan perkembangan sektor-sektor ekonomi di Kota Bengkulu cenderung mengikuti skenario nasional yaitu menuju keseimbangan antara industri pertanian yang mendorong pertumbuhan sektor lain. Sektor industri semakin berperan dalam menggerakkan perekonomian daerah dan menciptakan lapangan kerja baru. Pertumbuhan pesat sektor jasa seperti jasa dan pariwisata menjanjikan peluang perkembangan sektor ekonomi. Sektor ekonomi itu adalah :

1. Pertanian

Peranan sektor pertanian dalam perekonomian Kota Bengkulu hingga tahun 2005 masih sangat dominan. Kedudukan sektor pertanian sebagai *leading*

sektor dalam perekonomian Kota Bengkulu masih sulit digeser oleh sektor-sektor lainnya.

2. Perdagangan

Peranan sektor perdagangan dalam kehidupan perekonomian di Kota Bengkulu mempunyai peranan penting setelah pertanian kontribusi yang diperoleh dari sector perdagangan, belum cukup optimal dalam menggerakkan pembangunan di Kota Bengkulu.

3. Pariwisata

Kota Bengkulu juga sebagai kota tujuan wisata. Daerah wisata di Kota Bengkulu meliputi : Wisata Hutan bunga raksasa Rafflesia Arnoldi, Tapak Paderi dan Pantai Jakat, Pantai Panjang, Monumen Parr dan Hamilton, Benteng Marlborough, Rumah Kediaman Bung Karno

BAB V
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Diskripsi Data

Data yang dianalisis merupakan data APBD sesudah otonomi daerah yakni tahun 2000-2005. Data sesudah otonomi daerah dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember sehingga perhitungannya untuk satu tahun saja.

Tabel V.1
Realisasi Penerimaan PAD Kota Bengkulu
Tahun Anggaran 2000 – Tahun 2005
(Dalam Ribuan Rupiah)

Tahun	Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
2000	3.386.047
2001	5.169.968
2002	6.801.493
2003	9.683.037
2004	15.394.973
2005	13.920.334

Sumber : Dispenda Kota Bengkulu

Tabel V.2
Realisasi Transfer Pemerintah Kota Bengkulu
Tahun Anggaran 2000 – Tahun 2005
(Dalam Ribuan Rupiah)

Tahun	Realisasi Transfer Pemerintah
2000	48.385.295
2001	70.420.662
2002	129.370.000
2003	152.268.000
2004	157.916.025
2005	167.655.000

Sumber : Dispenda Kota Bengkulu

Tabel V.3
Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Bengkulu
Tahun Anggaran 2000 – Tahun 2005
(Dalam Ribuan Rupiah)

Tahun	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Laba BUMD	Penerimaan Dinas	Penerimaan Lain-lain	Total PAD
2000	1.538.505	1.717.504	8.253	-	121.385	3.386.047
2001	2.433.670	2.287.079	13.877	-	435.340	5.169.968
2002	3.377.391	2.210.364	-	-	1.213.737	6.801.493
2003	4.619.271	3.015.008	20.166	-	2.028.590	9.683.037
2004	9.402.767	4.451.121	167.439	-	1.373.644	15.394.973
2005	7.496.838	5.305.891	185.471	-	932.132	13.920.334

Sumber :Dispenda Kota Bengkulu

Keterangan : - = 0, menunjukkan tidak ada Penerimaan Dinas dan Laba BUMD pada tahun yang bersangkutan

Tabel V.4
Total Penerimaan Daerah Kota Bengkulu
Tahun Anggaran 2000 – Tahun 2005
(Dalam Ribuan Rupiah)

Tahun	Sisa Lebih Tahun Lalu	PAD	Dana Perimbangan	Pinjaman Daerah	Lain-lain Pendapatan Sah	Total Penerimaan Daerah
2000	1.871.621	3.386.047	52.024.772	478.110	121.385	59.881.935
2001	2.371.432	5.169.968	78.306.416	1.025.521	435.340	89.308.677
2002	3.944.117	6.801.493	138.471.533	-	9.461.237	158.678.380
2003	26.787.245	9.683.037	172.516.899	-	10.982.924	219.970.105
2004	13.128.676	15.394.973	179.744.133	-	8.463.000	216.730.782
2005	3.585.955	13.920.334	199.817.066	-	8.713.197	226.036.552

Sumber : Dispenda Kota Bengkulu

Keterangan : - = 0, menunjukkan tidak ada Pinjaman Daerah pada tahun yang bersangkutan

Tabel V.5
Realisasi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Kota Bengkulu
Tahun Anggaran 2000 – Tahun 2005
(Dalam Rupiah)

Tahun	Realisasi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
2000	3.639.476
2001	5.946.017
2002	7.439.067
2003	9.865.389
2004	11.225.065
2005	13.741.851

Sumber : Dispenda Kota Bengkulu

Tabel V.6
Realisasi Sumbangan dan Bantuan Kota Bengkulu
Tahun Anggaran 2000 – Tahun 2005
(Dalam Rupiah)

Tahun	Realisasi Sumbangan dan Bantuan
2000	48.385.295
2001	70.420.662
2002	129.370.000
2003	152.268.000
2004	157.916.025
2005	167.655.000

Sumber : Dispenda Kota Bengkulu

Tabel V.7
Total Pengeluaran Rutin Daerah Kota Bengkulu
Tahun Anggaran 2000 – Tahun 2005
(Dalam Ribuan Rupiah)

Pengeluaran	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Belanja Pegawai	22.727.492	83.084.534	82.892.961	114.566.321	123.479.537	132.283.073
Belanja Barang	4.544.232	6.474.747	9.681.044	18.001.588	17.798.640	20.451.269
Belanja Pemeliharaan	465.571	1.028.228	1.454.890	18.778.649	7.915.429	8.397.565
Belanja Perjalanan Dinas	392.671	934.500	1.271.616	3.268.799	3.068.192	3.757.798
Biaya Lain-lain	645.925	4.849.713	2.183.477	49.485.343	58.524.962	44.815.389
Angsuran Pinjaman	247.203	500.000	144.525	-	-	-
Subsidi / Sumbangan	145.121	205.000	233.318	-	-	-
Pengeluaran Bukan Bag.lain	116.843	790.000	561.959	1.287.315	1.974.913	5.261.690
Pengeluaran Tidak Tersangka	90.000	150.000	469.359	1.153.408	383.150	80.000
Total PRD	29.375.062	98.016.722	98.893.153	206.541.423	213.144.823	215.046.784

Sumber : Dispenda Kota Bengkulu

Keterangan : - = 0, menunjukkan tidak ada Angsuran Pinjaman dan Subsidi/Sumbangan pada tahun yang bersangkutan

B. Analisis Data

1. Pertumbuhan dan Perkembangan

a. Pendapatan Asli Daerah

Untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari Pendapatan Asli Daerah, kita harus melihat pertumbuhan dari realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Pertumbuhan dapat kita hitung dengan mengurangi realisasi pada tahun tertentu dengan tahun sebelumnya kemudian dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hasilnya kemudian dikalikan dengan 100%. Data tahun 2000 hanya terhitung sembilan bulan akibat terjadinya perubahan periode tahun anggaran. Karena itu, data tersebut disetahunkan dengan cara membagi 9 realisasi data kemudian hasil yang diperoleh dikalikan 12.

Berikut ini ditampilkan table perkembangan dan pertumbuhan PAD Kota Bengkulu:

Tabel V.8
Perkembangan dan Pertumbuhan PAD Kota Bengkulu
Tahun Anggaran 2000 – Tahun 2005
(Dalam Rupiah)

Tahun	PAD (Rp)	Perkembangan	Pertumbuhan (%)
2000	3.386.047	(741.648)	(17,96)
2001	5.169.968	1.783.321	52,65
2002	6.801.493	1.631.525	31,55
2003	9.683.037	2.881.544	42,36
2004	15.394.973	5.711.936	58,98
2005	13.920.334	(1.474.639)	(9,57)
Rata-rata			18,57

Sumber : Data diolah (2008)

Berdasarkan data diatas, besarnya laju pertumbuhan PAD Kota Bengkulu dari Tahun 2000 – Tahun 2005 setiap tahunnya meningkat. Rata-rata pertumbuhan PAD Kota Bengkulu adalah sebesar 18,57 % per tahun.

- i. Pada tahun 2000, PAD mengalami penurunan sebesar 17,96%. Pada tahun anggaran ini PAD mengalami penurunan dikarenakan pada tahun tersebut penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba Badan Usaha Milik Daerah, dan lain-lain pendapatan mengalami penurunan dibandingkan tahun 1999/2000.
- ii. Pada tahun 2001, perkembangan PAD mengalami peningkatan sebesar 52,65%. Pada tahun anggaran ini PAD mengalami peningkatan dikarenakan pada tahun tersebut penerimaan

- daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba Badan Usaha Milik Daerah, dan lain-lain pendapatan mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2000.
- iii. Pada tahun 2002, perkembangan PAD mengalami peningkatan sebesar 31,55%. Pada tahun anggaran ini PAD mengalami peningkatan dikarenakan pada tahun tersebut penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba Badan Usaha Milik Daerah, dan lain-lain pendapatan mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2001.
- iv. Pada tahun 2003, perkembangan PAD mengalami peningkatan sebesar 42,36%. Pada tahun anggaran ini PAD mengalami peningkatan dikarenakan pada tahun tersebut penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba Badan Usaha Milik Daerah, dan lain-lain pendapatan mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2002.
- v. Pada tahun 2004, perkembangan PAD mengalami peningkatan sebesar 58,98%. Pada tahun anggaran ini PAD mengalami peningkatan dikarenakan pada tahun tersebut penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba Badan Usaha Milik Daerah, dan lain-lain pendapatan mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2003.

vi. Pada tahun 2005, perkembangan PAD mengalami penurunan sebesar 9,57%. Pada tahun anggaran ini PAD mengalami penurunan dikarenakan pada tahun tersebut penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba Badan Usaha Milik Daerah, dan lain-lain pendapatan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2004.

b. Transfer Pemerintah

Untuk mengetahui bagaimana perkembangan dari Transfer Pemerintah, kita harus melihat pertumbuhan dari realisasi Penerimaan Transfer Pemerintah dengan nama lain Sumbangan dan Bantuan atau Dana Alokasi Umum. Pertumbuhan dapat kita hitung dengan mengurangkan realisasi pada tahun tertentu dengan tahun sebelumnya kemudian dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hasilnya kemudian dikalikan dengan 100%.

Tabel V.9
Perkembangan dan Pertumbuhan TP Kota Bengkulu
Tahun Anggaran 2000 – Tahun 2005
(Dalam Rupiah)

Tahun	TP (Rp)	Perkembangan	Pertumbuhan (%)
2000	48.385.295	11.712.544	31,93
2001	70.420.662	22.035.367	45,54
2002	129.370.000	58.949.338	83,71
2003	152.268.000	22.898.000	17,69
2004	157.916.025	5.648.025	3,70
2005	167.655.000	9.738.975	6,16
Rata-rata			30,91

Sumber : Data diolah (2008)

Berdasarkan data diatas, besarnya laju pertumbuhan Transfer Pemerintah di Kota Bengkulu dari Tahun 2000 – 2002, setiap tahunnya meningkat. Sedangkan Tahun 2003 – 2005 laju pertumbuhan Transfer Pemerintah cenderung menurun. Rata-rata pertumbuhan TP adalah sebesar 30,91% per tahun yang menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat masih cukup tinggi.

2. Derajat Otonomi Fiskal Daerah

Alat analisis yang digunakan untuk menentukan hubungan fiskal antara pemerintah pusat atau tingkat ketergantungan fiskal antara pemerintah pusat atau tingkat ketergantungan fiskal yang kuat antara daerah dengan pemerintah pusat dengan rumus sebagai berikut :

$$a. \text{DOFD} = \frac{\text{PADt}}{\text{TPDt}} \times 100\%$$

Berikut ini ditampilkan tabel hasil perhitungan DOFD yang membandingkan PAD terhadap Total Penerimaan Daerah.

Tabel V.10
Rasio PAD Terhadap TPD
Tahun Anggaran 2000 – Tahun 2005
(Dalam Rupiah)

Tahun	PAD (Rp)	TPD (Rp)	DOFD (%)
2000	3.386.047	59.881.935	5,65
2001	5.169.968	89.308.677	5,78
2002	6.801.493	158.678.380	4,28
2003	9.683.037	219.970.105	4,40
2004	15.394.973	216.730.782	7,10
2005	13.920.334	226.036.552	6,15
Rata-rata			19,75

Sumber : Data diolah (2008)

Hasil menunjukkan bahwa DOFD Kota Bengkulu saat otonomi daerah dilaksanakan mulai tahun 2000, DOFD pada tahun 2000 – 2001 dan tahun 2003 - 2004 mulai meningkat yang mengindikasikan bahwa Kota Bengkulu mulai mampu membiayai program pembangunannya dengan mengandalkan penerimaan dari PAD. Sedangkan pada tahun 2002 dan 2005 mengalami penurunan yang mengindikasikan bahwa Kota Bengkulu kurang mampu membiayai program pembangunannya dengan mengandalkan penerimaan dari PAD. DOFD juga dapat dihitung dengan menggunakan rumus lain sebagai berikut :

$$b. \text{DOFD} = \frac{\text{PADt}}{\text{TPt}} \times 100\%$$

Berikut ini ditampilkan tabel hasil perhitungan DOFD yang membandingkan PAD terhadap TP :

Tabel V.11
Rasio PAD Terhadap TP Kota Bengkulu
Tahun Anggaran 2000 – Tahun 2005
(Dalam Rupiah)

Tahun	PAD (Rp)	TP (RP)	DOFD (%)
2000	3.386.047	48.385.295	6,99
2001	5.169.968	70.420.662	7,34
2002	6.801.493	129.370.000	5,25
2003	9.683.037	152.268.000	6,35
2004	15.394.973	157.916.025	9,74
2005	13.920.334	167.655.000	8,30
Rata-rata			11,03

Sumber : Data diolah (2008)

Hasil analisis menunjukkan bahwa DOFD Kota Bengkulu dari tahun anggaran 2000 – tahun 2005 rata-rata sebesar 11,03% per tahun yang berarti tingkat ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat semakin tinggi dan menunjukkan bahwa Kota Bengkulu belum mampu mencukupi kebutuhan otonomi daerah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi DOFD dapat diketahui dengan menggunakan alat analisis:

a. Peranan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

Untuk mengetahui Peranan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak digunakan rumus sebagai berikut:

$$a. PBHP = \frac{\Sigma BHP}{\Sigma TPD} \times 100\%$$

Berikut ini ditampilkan tabel perkembangan dan pertumbuhan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Kota Bengkulu :

Tabel V.12
Perkembangan dan Pertumbuhan BHP Kota Bengkulu
Tahun Anggaran 2000 – Tahun 2005
(Dalam Rupiah)

Tahun	BHP (Rp)	Perkembangan	Pertumbuhan(%)
2000	3.639.476	326.341	9,85
2001	5.946.017	2.306.541	63,37
2002	7.439.067	1.493.050	25,11
2003	9.865.389	2.426.322	32,61
2004	11.225.065	1.359.676	13,78
2005	13.741.851	2.516.786	22,42
Rata-rata			16,63

Sumber : Data diolah (2008)

Berdasarkan data diatas maka dapat dihitung peranan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terhadap Total Penerimaan Daerah yang akan ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel V.13
Peranan BHP Terhadap TPD Kota Bengkulu
Tahun Anggaran 2000 – Tahun 2005
(Dalam Rupiah)

Tahun	BHP (Rp)	TPD (Rp)	PBHP (%)
2000	3.639.476	59.881.935	6,07
2001	5.946.017	89.308.677	6,66
2002	7.439.067	158.678.380	4,69
2003	9.865.389	219.970.105	4,48
2004	11.225.065	216.730.782	5,18
2005	13.741.851	226.036.552	6,08
Rata-rata			15,59

Sumber :Data diolah (2008)

Hasil analisis menunjukkan bahwa Peranan Bagi Hasil Pajak dan Bukab Pajak terhadap Total Penerimaan Daerah Kota Bengkulu dari tahun 2000 – tahun 2005 cenderung berfluktuasi rata-rata sebesar 15,59% per tahun menunjukkan bahwa Peranan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terhadap Total Penerimaan Daerah Kota Bengkulu cukup rendah.

b. Peranan Sumbangan dan Bantuan

Untuk mengetahui Peranan Sumbangan dan Bantuan digunakan rumus sebagai berikut :

$$b. \text{PSB} = \frac{\Sigma \text{SB}}{\Sigma \text{TPD}} \times 100\%$$

Berikut ini ditampilkan tabel Peranan Sumbangan dan Bantuan Kota Bengkulu :

Tabel V.14
Peranan SB Terhadap TPD Kota Bengkulu
Tahun Anggaran 2000 – Tahun 2005
(Dalam Rupiah)

Tahun	SB (Rp)	TPD (Rp)	PSB (%)
2000	48.385.295	59.881.935	80,80
2001	70.420.662	89.308.677	78,85
2002	129.370.000	158.678.380	81,53
2003	152.268.000	219.970.105	69,22
2004	157.916.025	216.730.782	72,86
2005	167.655.000	226.036.552	74,17
Rata-rata			153,15

Sumber : Data diolah (2008)

Hasil analisis menunjukkan bahwa Peranan Sumbangan dan Bantuan terhadap Total Penerimaan Daerah Kota Bengkulu dari tahun anggaran 2000 - tahun 2005 cenderung meningkat rata-rata sebesar 153,15% per tahun menunjukkan bahwa Peranan Sumbangan dan Bantuan terhadap Total Penerimaan Daerah Kota Bengkulu tinggi atau dengan kata lain tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat tinggi.

3. Indeks Kemampuan Rutin Daerah

Untuk mengetahui Indeks Kemampuan Rutin Daerah digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{IKRDt} = \frac{\text{TPADt}}{\text{TPRDt}} \times 100\%$$

Berikut ini ditampilkan tabel Peranan PAD terhadap Pengeluaran Rutin Daerah Kota Bengkulu :

Tabel V.15
Peranan PAD terhadap PRD Kota Bengkulu
Tahun Anggaran 1996 / 1997 – Tahun 2005
(Dalam Rupiah)

Tahun	PAD (Rp)	PRD (Rp)	IKRD (%)
2000	3.386.047	29.375.062	11,52
2001	5.169.968	98.016.722	5,27
2002	6.801.493	98.893.153	6,87
2003	9.683.037	206.541.423	4,69
2004	15.394.973	213.144.823	7,22
2005	13.920.334	215.046.784	6,47
Rata-rata			12,37

Sumber : Data diolah (2008)

Indeks Kemampuan Rutin Daerah menunjukkan hasil pengukuran sampai seberapa besar PAD mampu membiayai kebutuhan pengeluaran rutin. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa Indeks Kemampuan Rutin Daerah cenderung sangat rendah yaitu rata-rata sebesar 12,37% per tahun. Menurut kategori Kemampuan Rutin Daerah berada dalam kisaran 00,00% - 20,00% dengan kata lain masih sangat kurang dalam mencukupi dan menutupi pengeluaran daerah tersebut.

C. Pembahasan

Besarnya laju pertumbuhan PAD di Kota Bengkulu dari tahun 2000 – tahun 2005 meningkat sebesar 18,57% per tahun. Sedangkan laju pertumbuhan Transfer Pemerintah Kota Bengkulu dari tahun 2000 – tahun 2005 rata-rata meningkat sebesar 30,91% per tahun.

DOFD dari rasio antara PAD terhadap Total Penerimaan Daerah dari tahun 2000 – tahun 2005 menunjukkan bahwa DOFD Kota Bengkulu termasuk kriteria kurang, sesuai dengan tolak ukur yang dikeluarkan oleh Universitas Gajah Mada dan Depdagri. Hal tersebut yang mengindikasikan bahwa Kota Bengkulu belum mampu membiayai program pembangunannya dengan mengandalkan penerimaan dari PAD.

DOFD Kota Bengkulu dari rasio PAD terhadap TP dari tahun anggaran 2000 – tahun 2005 rata-rata sebesar 11,03% per tahun yang berarti tingkat ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat semakin tinggi dan menunjukkan bahwa Kota Bengkulu belum mampu mencukupi kebutuhan otonomi daerah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi DOFD antara lain: Peranan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terhadap Total Penerimaan Daerah Kota Bengkulu dari tahun anggaran 2000 – tahun 2005 cenderung berfluktuasi rata-rata sebesar 15,59% per tahun menunjukkan bahwa Peranan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terhadap Total Penerimaan Daerah Kota Bengkulu cukup rendah

Peranan Sumbangan dan Bantuan terhadap Total Penerimaan Daerah Kota Bengkulu dari tahun anggaran 2000 – tahun 2005 cenderung meningkat rata-rata

sebesar 153,15% per tahun menunjukkan bahwa Peranan Sumbangan dan Bantuan terhadap Total Penerimaan Daerah Kota Bengkulu sangat tinggi.

Indeks Kemampuan Rutin Daerah dari rasio PAD terhadap Pengeluaran Rutin Daerah dari tahun 2000 – tahun 2005 rata-rata sebesar 12,37% per tahun, terletak antara 00,00% - 20,00%. Menurut kategori kemampuan keuangan rutin daerah menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam membiayai pengeluaran masih sangat kurang dalam mencukupi dan menutupi pengeluaran rutin daerah tersebut.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dikemukakan dalam pembahasan diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Besar tingkat pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Transfer Pemerintah:
 - a. Besarnya laju pertumbuhan PAD di Kota Bengkulu dari tahun 2000 – tahun 2005 setiap tahunnya meningkat. Rata-rata pertumbuhan PAD meningkat sebesar 18,57% per tahun. Laju pertumbuhan PAD Kota Bengkulu tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan Kota Yogyakarta dari tahun 1997/1998 – 2003 sebesar 24,23% per tahun.
 - b. Besarnya laju pertumbuhan TP di Kota Bengkulu dari tahun 2000 – tahun 2005 setiap tahunnya meningkat. Rata-rata pertumbuhan TP meningkat sebesar 30,91% per tahun. Laju pertumbuhan TP Kota Bengkulu tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan laju pertumbuhan Kota Yogyakarta dari tahun 1997/1998 – 2003 sebesar 42,65% per tahun.
2. Besar kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari:
 - a. DOFD Kota Bengkulu dari rasio antara PAD terhadap Total Penerimaan Daerah dari tahun 2000 – tahun 2005 rata-rata sebesar 19,75% per tahun, menunjukkan bahwa DOFD Kota Bengkulu termasuk kriteria

kurang. DOFD Kota Bengkulu dari rasio antara PAD dengan Total Penerimaan Daerah tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan DOFD Kota Yogyakarta dari tahun 1997/1998 – 2003 sebesar 24,81% per tahun yang menunjukkan bahwa DOFD Kota Yogyakarta termasuk kriteria sedang.

- b. DOFD Kota Bengkulu dari rasio antara PAD terhadap TP dari tahun 2000 – tahun 2005 rata-rata sebesar 11,03% per tahun, menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat semakin tinggi. DOFD Kota Bengkulu dari rasio antara PAD dengan TP tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan DOFD Kota Yogyakarta dari tahun 1997/1998 – 2003 sebesar 46,55% per tahun yang menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat juga semakin tinggi.
- c. Peranan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terhadap Total Penerimaan Daerah Kota Bengkulu dari tahun anggaran 2000 – tahun 2005 cenderung berfluktuasi rata sebesar 15,59% per tahun, menunjukkan bahwa Peranan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terhadap Total Penerimaan Daerah Kota Bengkulu cukup rendah. Peranan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terhadap Total Penerimaan Daerah Kota Bengkulu tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan Peranan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terhadap Total Penerimaan Daerah Kota Yogyakarta tahun 1997/1998 – 2003 sebesar 11,71% per tahun yang

menunjukkan bahwa Peranan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak terhadap Total Penerimaan Daerah Kota Yogyakarta juga cukup rendah.

- d. Peranan Sumbangan dan Bantuan terhadap Total Penerimaan Daerah Kota Bengkulu dari tahun anggaran 2000 – tahun 2005 cenderung meningkat rata-rata sebesar 153,15% per tahun, menunjukkan bahwa Peranan Sumbangan dan Bantuan terhadap Total Penerimaan Daerah Kota Bengkulu sangat tinggi. Peranan Bagi Sumbangan dan Bantuan terhadap Total Penerimaan Daerah Kota Bengkulu tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan Peranan Sumbangan dan Bantuan terhadap Total Penerimaan Daerah Kota Yogyakarta tahun 1997/1998 – 2003 sebesar 54,25% per tahun yang menunjukkan bahwa Peranan Sumbangan dan Bantuan terhadap Total Penerimaan Daerah Kota Yogyakarta juga cukup tinggi.
- e. Indeks Kemampuan Rutin Daerah Kota Bengkulu dari tahun anggaran 2000 – tahun 2005 rata-rata sebesar 12,37% per tahun, menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam membiayai pengeluaran rutin masih sangat kurang dalam mencukupi dan menutupi pengeluaran rutin daerah tersebut. Indeks Kemampuan Rutin Daerah Kota Bengkulu tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan Indeks Kemampuan Rutin Daerah Kota Yogyakarta tahun 1997/1998 – 2003 sebesar 38,30% per tahun yang menunjukkan bahwa kemampuan Kota Yogyakarta dalam membiayai pengeluaran rutin masih sangat kurang dalam mencukupi dan menutupi pengeluaran rutin daerah.

B. Saran

1. Pemerintah Kota diharapkan dapat menggali sumber-sumber PAD yang berpotensi memberi tambahan pemasukan bagi PAD. Dilihat dari Tabel V.3, Pos terkecil dari sumber PAD Kota yang berasal dari penerimaan dinas. Pemerintah Kota diharapkan dapat meningkatkan pos penerimaan dinas untuk dapat memberi tambahan pemasukan bagi PAD.
2. Sebagian besar lahan di Kota Bengkulu dimanfaatkan sebagai lahan pariwisata, karena pendapatan terbesar yang diterima oleh Kota Bengkulu sebagian besar berasal dari sektor pariwisata seperti bangunan-bangunan sejarah dan tempat pariwisata lainnya. Sehingga pemerintah dapat meningkatkan penerimaan daerah dari bagian daerah atau Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dengan cara mengoptimalkan Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan Kota Bengkulu.

Daftar Pustaka

- Asa, Yashinta Roman Abanit. (2004). Analisis Efisiensi Pendapatan Asli Daerah: Studi Kasus Kabupaten Belu Propinsi NTT. *Skripsi*. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.
- Azhari, A. Samudra, Msi. (1995). *Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia. Pustaka Utama.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Depdagri RI dan Fisipol UGM. (1991). *Pengukuran Kemampuan Keuangan Dati II Dalam Rangka Otonomi Daerah Yang Nyata Dan Bertanggung jawab*. Jakarta.
- Bais, Yasinta Dolvina. (2003). Peran Pendapatan Asli Daerah Terhadap Penerimaan Daerah. *Skripsi*. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.
- Bastian, Indra. (2001). *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*. Edisi Pertama. Yogyakarta. BPFE.
- Devas, Nick, Brian Bindei, Anne Booth, Kenneth Davey, dan Roy Kelly. (1989). *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Edisi Pertama. Jakarta: UI Press.
- Halim, Abdul. (2004). *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Hartono, Anastasia. (2001). Strategi Pengembangan Ekonomi Dalam Rangka Otonomi Daerah. *Jurnal Widya Manajemen dan Akuntansi* volume 1. hal 18-26. Fakultas Ekonomi Unika Widya Mandala Surabaya.
- Hendrik, M.Y. (2002). "Kesiapan Mimika menjadi Daerah Otonom". *Tesis S-2*. Program Pasca Sarjana UGM.
- Ismanthono, Henricus W. (2003). *Kamus Istilah Ekonomi Populer*. Edisi Pertama. Jakarta: Kompas.
- Kartasasmita, Ginandjar. (1996). *Pembangunan untuk Rakyat*. Edisi Pertama . Jakarta: Cides.
- , Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
- Kuncoro, M. (1995). "Desentralisasi Fiskal di Indonesia: Dilema Otonomi dan Ketergantungan". *Prisma*. No.4, 3-17.

- Legowo, Herman. (2001). "Manajemen Keuangan Daerah dan Pemberdayaan Akuntan Sektor Publik dalam Otonomi Daerah". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. hal 16-24.
- Mamesah, D.J. (1995). *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT.Gramedia. Pustaka Utama.
- Maskun, Sumitro. (2001). Titik Berat Otonomi Pada Dati II Dalam Otonomi: *Peluang dan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Nadeak, Ruslina. (2003). Analisis Rasio Keuangan APBD untuk Menilai Kinerja Pemerintah Daerah: Studi Kasus pada Kabupaten Maluku Tenggara. *Skripsi*. Universitas Sanata Dharma.
- Radianto, Elia. (1997). " Otonomi Keuangan Daerah Tingkat II : Suatu Studi di Maluku". *Prisma*. No.3, 39-50.
- Radiyo, Thomas. (2005). Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Penerimaan Daerah. Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Bangka. *Skripsi*. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- _____, Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Retnowati, CH. Erlita. (2005). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Sebelum dan Selama Pelaksanaan Otonomi Daerah. Studi Kasus pada Pemerintah Kota Yogyakarta. *Skripsi*. Universitas Sanata Dharma.
- Silalahi, T.B. (2001). Otonomi Ditinjau Dari Aspek Sumber Daya Manajemen Dalam Otonomi: *Peluang Dan Tantangan*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Sunarsip. (2004). Mencari Format Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang Ideal. *Businnes News 7108*, Tanggal: 6 September 2004.
- Supriatno. (1993). *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta:Ichtiar.
- Suwardiman. (2007). "Pemekaran Kurang Cerminkan Aspirasi". Jakarta: Kompas. Hal 5. Tanggal: 24 September 2007.

- Syamsi, Ibnu. (1993). *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara*. Jakarta : Bina Aksara.
- Tukan, Yohanes Paulus. (2005). Analisis Rasio Keuangan Daerah Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Flores Timur. *Skripsi*. Universitas Sanata Dharma.
- Tumilar, Richard L.H. (1997). "Otonomi Keuangan dan Ekonomi Daerah Tingkat II di Propinsi Sulawesi Utara". *Tesis S-2*. Program Pasca Sarjana UGM.
- Waluya, Harry. (2001). "Analisis Rasio PAD/APBD Terhadap Kebijakan Kemandirian Keuangan Daerah Otonom". Jakarta. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Hal 184-192.
- Yuliati, Asnafiah. (2001). "Kemandirian dan Pertumbuhan Ekonomi Dalam Menyongsong Otonomi Daerah". Jakarta. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Hal 14-21.

www.depdagri.go.id

LAMPIRAN

**RINGKASAN
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PEMERINTAH KOTA BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2000**

NO	URAIAN	JUMLAH		NO	URAIAN	JUMLAH	
		Anggaran(Rp)	Anggaran(Rp)			Anggaran(Rp)	Anggaran(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Bagian sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	3.873.773.645,22	3.871.621.029,22	I	Belanja rutin	31.274.455.878,22	29.375.062.631,69
	a. Pos sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu	3.873.773.645,22	3.871.621.029,22		1. Belanja pegawai	22.038.999.006,00	22.727.492.340,00
II	Bagian pendapatan asli daerah sendiri	3.532.399.750,00	3.386.047.576,41		2. Belanja barang	3.174.074.525,00	4.544.232.715,00
	a. Pos pajak daerah	1.547.000.000,00	1.538.505.015,80		3. Belanja pemeliharaan	706.889.500,00	465.571.748,00
	b. Pos retribusi daerah	1.905.174.750,00	1.717.504.226,81		4. Belanja perjalanan dinas	424.550.000,00	392.671.600,00
	c. Pos bagian laba badan usaha daerah	34.475.000,00	8.253.023,00		5. Belanja lain-lain	720.408.750,00	645.925.874,00
	d. Pos lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	45.750.000,00	121.385.320,80		6. Angsuran pinjaman hutang dan bunga	1.057.098.597,22	247.203.582,55
III	Bagian pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah dan atau instansi	51.418.662.538,00	52.024.772.494,43		7. Ganjaran subsidi dan sumbangan kepada daerah bawahan	151.747.500,00	145.121.272,14
	a. Pos bagi hasil pajak	2.754.750.000,00	3.552.579.596,42		8. Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	310.688.000,00	116.843.500,00
	b. Pos bagi hasil bukan pajak	67.500.000,00	86.896.814,01		9. Pengeluaran tidak tersangka	90.000.000,00	90.000.000,00
	c. Pos subsidi daerah otonom	22.354.484.263,00	23.148.155.597,00	II	Belanja Pembangunan	29.488.351.775,00	26.061.982.906,00
	d. Pos bantuan pembangunan	26.201.828.275,00	25.237.140.487,00		1. Sektor industri	30.000.000,00	30.000.000,00
	e. Pos penerimaan lainnya	-	-		2. Sektor pertanian dan kehutanan	358.973.000,00	356.917.000,00
IV	Bagian pinjaman pemerintah daerah	1.938.571.720,00	478.110.000,00		3. Sektor SD air dan irigasi	-	-
	a. Pos pinjaman dari pemerintah pusat	-	-		4. Sektor perdagangan, keuangan	950.450.000,00	883.716.400,00
	b. Pos pinjaman dari lembaga keuangan dalam negeri	1.938.571.720,00	478.110.000,00		5. Sektor transportasi	9.139.951.000,00	6.820.241.671,00
					6. Sektor pariwisata	15.000.000,00	15.000.000,00
					7. Sektor pembangunan daerah	835.310.000,00	767.038.570,00
					8. Sektor lingkungan hidup	500.000.000,00	454.249.100,00
					9. Sektor pendidikan	5.296.120.267,00	5.289.272.029,00
					10. Sektor kependudukan	-	-
					11. Sektor kesehatan, anak &	1.910.881.500,00	1.404.047.425,00

					remaja 12.Sektor perumahan dan pemukiman	8.674.339.008,00	8.234.305.611,00
					13. Sektor agama	100.000.000,00	100.000.000,00
					14. Sektor Iptek	100.000.000,00	98.345.000,00
					15. Sektor hukum	85.000.000,00	84.990.800,00
					16. Sektor aparaturn pemerintah		
					17. Sektor politik,penerangan	1.367.327.000,00	1.338.970.300,00
					18.Sektor kamanan dan ketertiban	55.000.000,00	55.000.000,00
					19. Sektor subsidi pembangunan	70.000.000,00	69.885.000,00
					20.Subsidi/bantuan kepada daerah otonom	-	-
	JUMLAH	60.762.807.653,22	59.760.551.100,00		JUMLAH	60.762.807.653,22	55.437.045.537,63
V	Bagian urusan kas dan perhitungan	1.846.022.000,00	2.140.375.695,00	III	Bagian urusan kas dan perhitungan	1.646.022.000,00	2.140.375.655,00

RINGKASAN
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PEMERINTAH KOTA BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2001

NO	URAIAN	JUMLAH		NO	URAIAN	JUMLAH	
		Anggaran(Rp)	Anggaran(Rp)			Anggaran(Rp)	Anggaran(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Bagian sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	4.371.432.842,37	4.371.432.842,37	I	Belanja rutin	98.016.723.598,37	85.164.793.893,20
	a. Pos sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu	4.371.432.842,37	4.371.432.842,37		1. Belanja pegawai	83.084.534.806,00	73.994.703.527,00
II	Bagian pendapatan asli daerah sendiri	5.377.246.000,00	5.169.968.209,64		2. Belanja barang	6.474.747.250,00	5.437.302.747,00
	a. Pos pajak daerah	1.855.000.000,00	2.433.670.868,78		3. Belanja pemeliharaan	1.028.228.000,00	846.435.242,00
	b. Pos retribusi daerah	3.009.000.000,00	2.287.079.547,00		4. Belanja perjalanan dinas	934.500.000,00	838.368.750,00
	c. Pos bagian laba badan usaha daerah	35.000.000,00	13.877.500,00		5. Belanja lain-lain	4.849.713.542,37	3.316.038.348,00
	d. Pos lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	458.245.000,00	435.340.293,86		6. Angsuran pinjaman hutang dan bunga	500.000.000,00	251.420.299,20
III	Bagian dana perimbangan	85.148.635.036,00	78.306.416.522,40		7. Ganjaran subsidi dan sumbangan kepada daerah bawahan	205.000.000,00	160.532.775,00
	a. Pos bagi hasil pajak	10.028.974.036,00	5.829.114.854,12		8. Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	790.000.000,00	251.073.805,00
	b. Pos bagi hasil bukan pajak	1.342.000.000,00	116.902.961,28		9. Pengeluaran tidak tersangka	150.000.000,00	58.918.000,00
	c. Pos dana alokasi umum	70.420.662.000,00	70.420.662.000,00	II	Belanja Pembangunan	8.282.124.000,00	5.675.720.346,00
	d. Pos dana alokasi khusus	3.357.000.000,00	1.939.736.707,00		1. Sektor industri	-	-
	e. Pos dana darurat	-	-		2. Sektor pertanian dan kehutanan	-	-
IV	Bagian pinjaman daerah	1.025.508.720,00	1.025.521.000,00		3. Sektor SD air dan irigasi	-	-
	a. Pos pinjaman dalam negeri	1.025.508.720,00	1.025.521.000,00		4. Sektor perdagangan , keuangan	-	-
	b. Pos pinjaman luar negeri	-	-		5. Sektor transportasi	80.000.000,00	79.450.000,00
V	Bagian lain-lain penerimaan yang sah	10.376.024.000,00	10.453.063.765,09		6. Sektor pariwisata	1.778.368.720,00	1.778.281.000,00
	a. Penerimaan dari propinsi	1.100.000.000,00	1.107.257.543,09		7. Sektor pembangunan daerah	21.500.000,00	21.500.000,00
	b. Penerimaan dari kabupaten/kota lainnya	-	-		8. Sektor lingkungan hidup	180.000.000,00	179.955.000,00
	c. Penerimaan lain-lain	240.200.000,00	309.982.222,00		9. Sektor pendidikan	1.672.000.000,00	1.198.648.727,00
					10. Sektor kependudukan		

	d. Pos dana kontijensi	9.035.824.000,00	9.035.824.000,00		11.Sektor kesehatan, anak & remaja 12.Sektor perumahan dan pemukiman 13. Sektor agama 14. Sektor Iptek 15. Sektor hukum 16. Sektor aparaturn pemerintah 17. Sektor politik,penerangan 18.Sektor kamanan dan ketertiban 19. Sektor subsidi pembangunan 20.Subsidi/bantuan kepada daerah otonom	- - 1.062.000.000,00 3.023.963.780,00 - 30.000.000,00 83.000.000,00 350.887.000,00 - - -	- - 1.040.446.632,00 1.213.513.487,00 - 30.000.000,00 83.000.000,00 50.835.500,00 - - -
	JUMLAH	105.298.847.598,37	99.326.402.339,50		JUMLAH	106.298.847.598,37	90.840.514.239,20
VI	Bagian urusan kas dan perhitungan	1.538.630.000,00	9.057.032.581,00	III	Bagian urusan kas dan perhitungan	1.538.690.000,00	9.067.082581,00

**RINGKASAN
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PEMERINTAH KOTA BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2002**

NO	URAIAN	JUMLAH		NO	URAIAN	JUMLAH	
		Anggaran(Rp)	Anggaran(Rp)			Anggaran(Rp)	Anggaran(Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Bagian sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu	3.944.117.135,44	3.944.117.135,44	I	Belanja rutin	124.926.605.385,44	101.293.269.686,40
	a. Pos sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu	3.944.117.135,44	3.944.117.135,44		1. Belanja pegawai	97.137.053.460,00	82.892.961.572,00
II	Bagian pendapatan asli daerah sendiri	5.419.490.000,00	6.801.493.495,39		2. Belanja barang	10.956.282.525,00	9.681.044.669,00
	a. Pos pajak daerah	2.086.420.000,00	3.377.391.830,00		3. Belanja pemeliharaan	2.018.855.000,00	1.454.890.495,00
	b. Pos retribusi daerah	2.928.070.000,00	2.210.364.609,34		4. Belanja perjalanan dinas	1.466.402.000,00	1.271.616.750,00
	c. Pos bagian laba badan usaha daerah	35.000.000,00	-		5. Belanja lain-lain	6.870.297.000,44	2.183.477.412,00
	d. Pos lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	370.000.000,00	1.213.737.056,05		6. Angsuran pinjaman hutang dan bunga	808.700.000,00	144.525.590,40
III	Bagian dana perimbangan	135.124.195.432,00	138.471.533.581,00		7. Belanja pensiun dan onderstand	-	-
	a. Pos bagi hasil pajak	2.113.524.000,00	7.401.934.620,00		8. Ganjaran, subsidi kepada daerah bawahan	464.100.000,00	233.318.268,00
	b. Pos bagi hasil bukan pajak	492.339.050,00	37.132.860,00		9. Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain	1.976.266.000,00	561.959.705,00
	c. Pos dana alokasi umum	129.370.000.000,00	129.370.000.000,00		10. Pengeluaran tidak terangka	500.000.000,00	469.359.150,00
	d. Pos dana alokasi khusus	3.148.332.382,00	1.662.466.101,00		11. Pemeliharaan prasarana kota	2.728.649.400,00	2.400.116.075,00
	e. Pos dana darurat	-	-	II	Belanja Pembangunan	27.521.197.182,00	24.065.415.611,00
IV	Bagian pinjaman daerah	-	-		1. Sektor industri	88.758.000,00	88.758.000,00
	a. Pos pinjaman dalam negeri	-	-		2. Sektor pertanian dan kehutanan	2.036.035.000,00	1.083.018.500,00
	b. Pos pinjaman luar negeri	-	-		3. Sektor SD air dan irigasi	853.039.800,00	852.631.500,00
V	Bagian lain-lain penerimaan yang sah	7.960.000.000,00	9.461.237.733,68		4. Sektor perdagangan, keuangan	111.000.000,00	111.000.000,00
	Lain-lain penerimaan yang sah	7.960.000.000,00	9.461.237.733,68		5. Sektor transportasi	3.672.036.000,00	2.247.900.880,00
					6. Sektor pariwisata	1.945.500.000,00	1.545.009.150,00
					7. Sektor pembangunan daerah	800.000.000,00	798.925.500,00
					8. Sektor lingkungan hidup	973.570.000,00	970.819.500,00
					9. Sektor pendidikan		

					10. Sektor kependudukan	2.031.000.000,00	1.709.701.950,00
					11.Sektor kesehatan, anak & remaja	2.515.934.000,00 59.300.000,00	2.489.569.205,00 59.300.000,00
					12.Sektor perumahan dan pemukiman	3.215.607.000,00	3.183.780.750,00
					13. Sektor agama	2.634.317.382,00	2.405.111.681,00
					14. Sektor Iptek		
					15. Sektor hukum	701.700.000,00	701.284.000,00
					16. Sektor aparaturn pemerintah	160.000.000,00	160.000.000,00
					17. Sektor politik,penerangan	195.000.000,00	192.598.000,00
					18.Sektor kemanan dan ketertiban	4.891.400.000,00	4.843.836.920,00
					19. Sektor subsidi pembangunan	-	-
					20.Subsidi/bantuan kepada daerah otonom	637.000.000,00 -	620.170.075,00 -
	JUMLAH	152.447.802.567,44	158.678.381.945,51		JUMLAH	152.447.802.567,44	125.358.685.297,4
VI	Bagian urusan kas dan perhitungan	15.078.684.205,00	11.018.572.174,00	III	Bagian urusan kas dan perhitungan	15.078.684.205,00	11.018.572.174,0

PEMERINTAH KOTA BENGKULU
RINGKASAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2003

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1	2	4	5
I	PENDAPATAN	Rp 193,529,806,635.65	Rp 193,182,860,871.47
1.1	Pendapatan Asli Daerah	Rp 10,444,773,000.00	Rp 9,693,037,209.47
1.1.1	Pajak Daerah	Rp 4,453,500,000.00	Rp 4,619,271,715.00
1.1.2	Retribusi Daerah	Rp 4,116,273,000.00	Rp 3,015,008,411.47
1.1.3	Pos Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan	Rp 35,000,000.00	Rp 20,166,613.00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp 1,840,000,000.00	Rp 2,023,590,470.00
1.2	Dana Perimbangan	Rp 172,140,033,635.65	Rp 172,516,899,655.00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	Rp 10,583,483,140.49	Rp 9,865,389,780.00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	Rp 152,270,000,000.00	Rp 152,268,000,000.00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	Rp 6,290,000,000.00	Rp 5,300,000,000.00
1.2.4	Pos Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dan Propinsi	Rp 2,996,550,495.16	Rp 5,083,509,875.00
1.3	Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp 10,945,000,000.00	Rp 10,982,924,007.00
1.3.1	Bantuan Dana Kortijensi / Penyeimbang	Rp 10,945,000,000.00	Rp 10,982,924,007.00
II	BELANJA	Rp 224,352,182,350.76	Rp 206,541,429,510.00
2.1	APARATUR DAERAH	Rp 141,004,283,246.00	Rp 129,209,031,123.00
2.1.1	Belanja Administrasi Umum	Rp 125,335,721,430.00	Rp 114,012,005,483.00
2.1.1.1	Belanja Pegawai/Personalia	Rp 112,757,147,000.00	Rp 103,858,888,860.00
2.1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 6,780,543,000.00	Rp 5,402,238,523.00
2.1.1.3	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 1,678,570,000.00	Rp 1,561,279,850.00
2.1.1.4	Belanja Pemeliharaan	Rp 4,119,451,430.00	Rp 3,199,618,250.00
2.1.2	Belanja Operasional dan Pemeliharaan	Rp 6,083,872,000.00	Rp 5,824,192,040.00
2.1.2.1	Belanja Pegawai/Personalia	Rp 5,083,872,000.00	Rp 5,824,192,040.00
2.1.2.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp -	Rp -
2.1.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	Rp -	Rp -
2.1.2.4	Belanja Pemeliharaan	Rp -	Rp -
2.1.3	Belanja Modal	Rp 9,584,689,816.00	Rp 9,371,833,800.00
2.2	PELAYANAN PUBLIK	Rp 79,479,870,114.76	Rp 74,892,874,724.00
2.2.1	Belanja Administrasi Umum	Rp 28,124,622,444.76	Rp 27,011,925,964.00
2.2.1.1	Belanja Pegawai/Personalia	Rp 2,863,957,445.00	Rp 2,722,531,052.00
2.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 7,693,452,000.00	Rp 7,042,632,892.00
2.2.1.3	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 1,774,520,000.00	Rp 1,717,520,000.00
2.2.1.4	Belanja Pemeliharaan	Rp 15,792,692,999.76	Rp 15,529,242,220.00
2.2.2	Belanja Operasional dan Pemeliharaan	Rp 7,846,032,000.00	Rp 7,767,237,849.00
2.2.2.1	Belanja Pegawai/Personalia	Rp 2,180,000,000.00	Rp 2,160,730,000.00
2.2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 5,616,032,000.00	Rp 5,556,718,799.00
2.2.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	Rp -	Rp -
2.2.2.4	Belanja Pemeliharaan	Rp 50,000,000.00	Rp 49,789,050.00
2.2.3	Belanja Modal	Rp 43,609,215,870.00	Rp 40,113,510,911.00

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
1	2	4	5
2.3	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	Rp 2,868,028,000.00	Rp 1,287,315,263.00
2.4	Belanja Tidak Tersangka	Rp 1,200,000,000.00	Rp 1,163,408,500.00
	Surplus/(Defisit)	Rp (30,822,375,725.11)	Rp (13,358,588,738.93)
III	PEMBIAYAAN	Rp 28,987,245,725.11	Rp 28,487,245,725.11
3.1	Penerimaan Daerah	Rp 30,787,245,725.11	Rp 28,787,245,725.11
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	Rp 28,787,245,725.11	Rp 26,787,245,725.11
3.1.2	Transfer Dari Dana Cadangan	Rp 4,000,000,000.00	Rp -
3.1.3	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	Rp -	Rp -
3.2.4	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Dipisahkan	Rp -	Rp -
3.2	Pengeluaran Daerah	Rp 800,000,000.00	Rp 300,000,000.00
3.2.1	Transfer ke Dana Cadangan	Rp -	Rp -
3.2.2	Penyertaan Modal	Rp 300,000,000.00	Rp 300,000,000.00
3.2.3	Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo	Rp 500,000,000.00	Rp -
3.2.4	Sisa Lebih dari Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp -	Rp -

PEMERINTAH KOTA BENGKULU
RINGKASAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2004

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
I	PENDAPATAN	209,608,671,228.00	203,602,107,328.39
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	17,502,275,700.00	15,364,873,809.39
1.1.1	Pajak Daerah	9,561,847,700.00	9,402,767,665.00
1.1.2	Retribusi Daerah	5,313,878,000.00	4,451,121,330.00
1.1.3	Bagian Laba Usaha Daerah	911,750,000.00	167,439,701.39
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2,515,000,000.00	1,373,644,913.00
1.2	DANA PERIMBANGAN	163,643,365,528.00	179,744,133,519.00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Dan Bukan Pajak	10,070,967,140.00	11,225,065,004.00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	159,769,596,000.00	157,916,025,393.00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	6,670,000,000.00	6,650,000,000.00
1.2.4	Dana Perimbangan Dari Propinsi	7,112,812,388.00	3,963,043,122.00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	8,463,000,000.00	8,463,000,000.00
II	BELANJA	226,707,416,580.00	213,144,829,257.83
2.1	APARATUR DAERAH	143,490,237,996.00	133,544,449,431.29
2.1.1	BELANJA ADMINISTRASI UMUM	127,333,462,998.00	117,824,927,768.29
2.1.1.1	Belanja Pegawai	116,573,134,998.00	107,548,540,414.29
2.1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6,611,343,000.00	4,720,112,497.00
2.1.1.3	Belanja Perjalanan Dinas	1,701,000,000.00	1,626,921,160.00
2.1.1.4	Belanja Pemeliharaan	4,547,985,000.00	3,929,353,707.00
2.1.2	BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN	9,643,025,000.00	9,350,968,145.00
2.1.2.1	Belanja Pegawai	9,643,025,000.00	9,350,968,145.00
2.1.2.2	Belanja Barang dan Jasa		
2.1.2.3	Belanja Perjalanan Dinas		
2.1.2.4	Belanja Pemeliharaan		
2.1.3	BELANJA MODAL	6,613,750,000.00	6,366,553,518.00
2.2	BELANJA PUBLIK	83,217,177,582.00	79,600,379,826.54
2.2.1	BELANJA ADMINISTRASI UMUM	13,464,392,545.00	12,581,285,058.00

PEMERINTAH KOTA BENGKULU
RINGKASAN PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2004

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
2.2.1.1	Belanja Pegawai	3,155,783,945.00	2,920,955,658.00
2.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7,016,108,600.00	6,374,558,400.00
2.2.1.3	Belanja Perjalanan Dinas	1,448,000,000.00	1,441,271,000.00
2.2.1.4	Belanja Pemeliharaan	1,844,500,000.00	1,844,500,000.00
2.2.1	BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN	13,175,486,800.00	12,504,621,705.00
2.2.2.1	Belanja Pegawai	3,874,336,000.00	3,659,074,230.00
2.2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7,113,150,600.00	6,703,970,900.00
2.2.2.3	Belanja Perjalanan Dinas		
2.2.2.4	Belanja Pemeliharaan	2,168,000,000.00	2,141,576,575.00
2.2.3	BELANJA MODAL	53,602,912,870.00	52,156,409,904.54
2.2.4	BELANJA BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN	2,474,385,367.00	1,974,913,159.00
2.2.5	BELANJA TIDAK TERSANGKA	500,000,000.00	383,150,000.00
	Surplus(Defisit)	(17,088,744,352.00)	(9,542,721,929.44)
III	PEMBIAYAAN	30,202,884.00	9,542,721,929.44
3.1	PENERIMAAN DAERAH	17,128,676,986.18	13,128,676,986.18
3.1.1	Sisa lebih Anggaran Tahun Lalu	13,128,676,986.18	13,128,676,986.18
3.1.2	Transfer Dan Dana Cadangan	4,000,000,000.00	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman Dan Obligasi		
3.1.4	Hasil Penjualan Aseil Daerah Yang Dipisahkan		
3.2	PENGELUARAN DAERAH	17,098,474,102.18	3,585,955,056.74
3.2.1	Transfer ke Dana Cadangan	3,969,797,116.00	
3.2.2	Penyertaan Modal		
3.2.3	Pembayaran Hutang Pokok Yang Jstuh Tempo		
3.2.4	Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan	13,128,675,985.18	3,585,955,056.74

**RINGKASAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PEMERINTAH KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2005**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi
1	PENDAPATAN	217.693.648.195,00	222.450.598.358,62
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	16.703.426.000,00	13.920.334.968,08
1.1.1	Pajak Daerah	7.344.496.000,00	7.496.838.430,00
1.1.2	Retribusi Daerah	5.598.930.000,00	5.305.891.849,10
1.1.3	Bagian Laba Usaha Daerah	275.000.000,00	185.471.702,44
1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah	3.485.000.000,00	932.132.986,54
1.2	DANA PERIMBANGAN	192.845.222.195,00	199.817.066.204,34
1.2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	11.525.479.140,00	13.741.881.748,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	167.650.000.000,00	167.655.000.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	8.410.000.000,00	8.410.000.000,00
1.2.4	Dana Perimbangan Dari Propinsi	5.259.743.055,00	10.010.214.456,34
1.3	LAIN - LAIN PAD YANG SAH	8.145.000.000,00	8.713.197.186,20
2	BELANJA	218.779.803.256,74	215.046.790.509,05
2.1	APARATUR DAERAH	146.961.831.655,16	146.771.476.485,00
2.1.1	BELANJA ADMINISTRASI UMUM	129.358.124.405,16	130.414.401.604,00
2.1.1.1	Belanja Pegawai dan Personalia	115.143.172.609,16	117.239.228.605,00
2.1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	7.919.714.796,00	7.779.260.196,00
2.1.1.3	Belanja Perjalanan Dinas	2.989.851.000,00	2.496.224.100,00
2.1.1.4	Belanja Pemeliharaan	3.305.386.000,00	2.899.688.703,00
2.1.2	BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN	11.165.107.000,00	10.053.365.536,00
2.1.2.1	Belanja Pegawai Personalia	10.475.943.000,00	9.530.043.035,00
2.1.2.2	Belanja Barang dan Jasa	445.100.000,00	324.565.000,00
2.1.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	118.000.000,00	113.315.000,00
2.1.2.4	Belanja Pemeliharaan	126.064.000,00	85.442.500,00
2.1.3	BELANJA MODAL	6.438.600.250,00	6.303.709.346,00
2.2	BELANJA PUBLIK	71.817.771.601,58	68.275.314.024,05
2.2.1	BELANJA ADMINISTRASI UMUM	12.323.393.384,58	11.198.962.763,00
2.2.1.1	Belanja Pegawai dan Personalia	3.281.535.384,58	2.520.086.913,00
2.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.785.208.000,00	5.418.033.202,00
2.2.1.3	Belanja Perjalanan Dinas	1.150.000.000,00	1.148.259.987,00
2.2.1.4	Belanja Pemeliharaan	2.106.650.000,00	2.106.582.661,00
2.2.2	BELANJA OPERASI DAN PEMELIHARAAN	13.940.860.192,00	13.222.980.419,00
2.2.2.1	Belanja Pegawai Personalia	3.086.845.265,00	2.987.716.150,00
2.2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	7.477.948.500,00	6.929.411.144,00
2.2.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	0,00
2.2.2.4	Belanja Pemeliharaan	3.376.066.427,00	3.305.853.125,00
2.2.3	BELANJA MODAL	39.267.860.312,00	38.511.680.024,05
2.2.4	BELANJA BAGI HASIL BANTUAN KEUANGAN	5.785.657.713,00	5.261.690.818,00
2.2.5	BELANJA TIDAK TERSANGKA	500.000.000,00	80.000.000,00
	Surplus / Defisit		7.403.807.849,57
3	PEMBIAYAAN	-2.500.000.000,00	-7.403.807.849,57
3.1	PENERIMAAN DAERAH	3.585.955.056,74	3.585.955.056,74
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Thi lalu	3.585.955.056,74	3.585.955.056,74
3.1.2	Transfer Dan Dana cadangan	0,00	0,00
3.1.3	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	0,00	0,00
3.1.4	Hasil Penjualan Aset Daerah yg Dipisahkan	0,00	0,00
3.2	PENGELUARAN DAERAH	6.085.955.056,74	10.989.762.906,31
3.2.1	Transfer ke Dana Cadangan	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Hutang Pokok Yang Jatuh Tempo	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
3.2.4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkehaan	3.585.955.056,74	8.489.762.906,31